



BAB V
PENJELASAN ATAS POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

5.1.1. Pendapatan

Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
3,901,482,457,873.00	3,774,437,763,944.69	96.74	(127,044,693,928.31)	3,359,727,964,530.99

Sumber Pendapatan Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Pusat (Dana Perimbangan), Pendapatan Transfer Pusat Lainnya, Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan anggaran dan realisasi per 31 Desember 2019 serta realisasi TA 2018 sebagai berikut:

Tabel 5.1 Pendapatan

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Pendapatan Asli Daerah	429,370,673,127.00	226,245,884,732.22	52.69	(203,124,788,394.78)	319,280,511,092.11
Pendapatan Transfer Pusat Dana Perimbangan	3,126,744,474,578.00	3,192,463,207,633.00	102.10	65,718,733,055.00	2,783,227,694,772.00
Pendapatan Transfer Pusat Lainnya	131,071,696,000.00	131,071,695,996.00	100.00	(4.00)	144,783,974,996.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	128,008,014,168.00	139,611,455,583.47	109.06	11,603,441,415.47	112,435,783,670.88
Lain-lain Pendapatan yang sah	86,287,600,000.00	85,045,520,000.00	98.56	(1,242,080,000.00)	0.00
Jumlah	3,901,482,457,873.00	3,774,437,763,944.69	96.74	(127,044,693,928.31)	3,359,727,964,530.99

Realisasi Pendapatan Kabupaten Bengkulu Selatan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.774.437.763.944,69 atau 96,74% dari nilai anggaran sebesar Rp3.901.482.457.873,00. Jika dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp3.359.727.964.530,99 mengalami kenaikan sebesar Rp414.709.799.413,70 atau 12,34%.

Masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah

Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
429,370,673,127.00	226,245,884,732.22	52.69	(203,124,788,394.78)	319,280,511,092.11

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkulu Selatan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp226.245.884.732,22 atau 52,69% dari nilai anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2018 sebesar Rp319.280.511.092,11 mengalami penurunan sebesar Rp93.034.626.359,89 atau 29,14%.

[Lampiran PAD](#)

Tabel 5.2 Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Pendapatan Pajak Daerah	188,800,000,000.00	67,049,392,095.39	35.51	(121,750,607,904.61)	65,992,135,999.25
Pendapatan Retribusi Daerah	29,285,008,750.00	10,232,707,278.23	34.94	(19,052,301,471.77)	14,689,253,182.22



Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan	40,000,000,000.00	28,788,248,654.00	71.97	(11,211,751,346.00)	31,369,321,102.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	171,285,664,377.00	120,175,536,704.60	70.16	(51,110,127,672.40)	207,229,800,808.64
Jumlah	429,370,673,127.00	226,245,884,732.22	52.69	(203,124,788,394.78)	319,280,511,092.11

Realisasi masing-masing jenis PAD per 31 Desember 2019 dan TA 2018 dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Pajak Daerah

Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
188,800,000,000.00	67,049,392,095.39	35.51	(121,750,607,904.61)	65,992,135,999.25

Pendapatan Pajak Daerah merupakan pendapatan yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis. Pemungutan Penerimaan dan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah per 31 Desember 2019 serta realisasi TA 2018 sebagai berikut:

Tabel 5.3 Pendapatan Pajak Daerah

Jenis Pajak	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Pajak Hotel	8,000,000,000.00	2,751,356,084.25	34.39	(5,248,643,915.75)	1,978,755,647.60
Pajak Restoran	20,000,000,000.00	10,757,834,432.00	53.79	(9,242,165,568.00)	8,917,414,432.50
Pajak Hiburan	3,000,000,000.00	2,042,325,384.00	68.08	(957,674,616.00)	784,135,634.00
Pajak Reklame	2,500,000,000.00	446,739,096.00	17.87	(2,053,260,904.00)	470,525,236.00
Pajak Penerangan Jalan PLN	25,000,000,000.00	18,623,714,559.00	74.49	(6,376,285,441.00)	17,605,936,189.00
Pajak Penerangan Jalan non PLN	38,000,000,000.00	12,207,819,542.04	32.13	(25,792,180,457.96)	17,800,260,693.39
Pajak Pengambilan Bahan Galian C / Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25,000,000,000.00	4,520,885,840.00	18.08	(20,479,114,160.00)	1,845,422,500.00
Pajak Parkir	2,200,000,000.00	463,670,066.00	21.08	(1,736,329,934.00)	332,332,336.00
Pajak Air Bawah Tanah	3,100,000,000.00	681,742,756.30	21.99	(2,418,257,243.70)	518,282,080.76
Pajak Sarang Burung Walet	1,000,000,000.00	368,332,930.00	36.83	(631,667,070.00)	357,059,000.00
Pajak Bagi Hasil dari PBB P2	35,500,000,000.00	9,711,689,715.00	27.36	(25,788,310,285.00)	9,616,682,191.00
Pajak BPHTB	25,500,000,000.00	4,473,281,690.80	17.54	(21,026,718,309.20)	5,765,330,059.00
Jumlah	188,800,000,000.00	67,049,392,095.39	35.51	(121,750,607,904.61)	65,992,135,999.25

Dengan melihat tabel diatas menunjukkan Penerimaan pajak daerah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp67.049.392.095,39 atau 35,51% dari anggaran. Sedangkan realisasi tahun 2018 sebesar Rp65.992.135.999,25 penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan sebesar Rp1.057.256.096,14 atau 1,60%. Pendapatan Pajak Daerah ini dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah.



Pajak Reklame, Pajak Bagi Hasil dari PBB P2 menggunakan metode *Official Assesment* sedangkan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan PLN dan Non PLN, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Pengambilan Bahan Galian C, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak BPHTB menggunakan metode *Self Assesment* sesuai dengan UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dipertegas dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 11 tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 1 tahun 2018 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 02 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah tercapai hingga 31 Desember 2019 yang terealisasi lebih kecil dari anggarannya dibawah 50% adalah : Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Non PLN, Pajak Pengambilan Bahan Galian C / Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bagi Hasil dari PBB P2 dan Pajak BPHTB.

Hal ini dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut :

Kondisi perekonomian global yang sedang melemah baik nasional maupun regional yang belum membaik dan kondusif berdampak terhadap iklim investasi serta perkembangan dunia usaha

Hal ini berpengaruh terhadap perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bengkalis sehingga dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya dan penghentian operasional perusahaan serta terdapat pula perusahaan yang memutuskan untuk menunda operasional usahanya. Kondisi ini belum membaik dan kondusif sampai saat ini terlihat rendahnya tingkat hunian hotel, kurangnya tingkat kunjungan tempat hiburan, restoran, rumah makan, kedai minuman dan maupun pusat keramaian lainnya.

Dengan adanya kondisi perekonomian global belum membaik terjadinya penurunan yang sangat signifikan terhadap penerimaan dari sektor pajak daerah, seperti dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan lainnya, kondisi ini juga turut mempengaruhi realisasi penerimaan pajak yang bersumber langsung dari masyarakat seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) serta pajak atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Masih tingginya tingkat ketidakpatuhan dan kepatutan serta kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu.

Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang yang menganut sistem *Self Assessment System* sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib, termasuk di dalamnya kepatuhan terhadap pelunasan tunggakan maupun denda yang diwajibkan kepada wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Masih adanya kendala dan hambatan dalam regulasi.

Belum adanya regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Teknis terhadap besaran Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) untuk kegiatan air tanah ikutan industri hulu migas yang jumlahnya sangat besar, kondisi ini menyebabkan menyebabkan pajak air tanah tidak dapat ditagih kepada wajib pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang dikelola SKK Migas yang potensial berkontribusi besar terhadap target penerimaan pajak air tanah, meskipun telah ada Peraturan Gubernur Riau yang mengatur tentang Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) khusus untuk non migas.

Disamping itu juga belum adanya regulasi terkait dengan penetapan jenis pajak mineral bukan logam dan batuan (minerba) objek apa saja yang dikenakan pajak tersebut, dan banyaknya aturan yang bertentangan, kondisi ini berpengaruh terhadap penerimaan pajak.



Belum optimalnya kinerja petugas pajak (fiskus) dalam memberikan pelayanan, pembinaan, penagihan dan penerapan sanksi perpajakan.

Peningkatan kinerja petugas pajak pada hakekatnya memang merupakan faktor dominan yang harus selalu mendapat perhatian dan ditingkatkan dari waktu ke waktu. Dalam hal ini upaya-upaya meningkatkan kapasitas maupun kapabilitas mutlak harus dapat terlaksana, meskipun secara bertahap. Dengan pendekatan dan pelayanan yang memuaskan wajib pajak, akan meningkatkan kepatuhan dan kepatutan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Pendapatan Retribusi Daerah

Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
29,285,008,750.00	10,232,707,278.23	34.94	(19,052,301,471.77)	14,689,253,182.22

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu. Pemungutan dan Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil.

Retribusi Daerah Kabupaten Bengkulu tahun 2019 dipungut berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi serta diatur pada peraturan daerah nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum, Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Realisasi Pendapatan retribusi selama sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp10.232.707.278,23 atau 34,94% dari anggaran sebesar Rp29.285.008.750,00. Jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 sebesar Rp14.689.253.182,22 maka mengalami penurunan sebesar Rp4.456.545.903,99 atau 30,34%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Jasa Umum	6,066,375,000.00	3,520,044,600.00	58.03	(2,546,330,400.00)	8,292,585,837.00
Jasa Usaha	18,201,352,500.00	6,084,638,063.00	33.43	(12,116,714,437.00)	5,767,524,133.00
Perizinan Tertentu	5,017,281,250.00	628,024,615.23	12.52	(4,389,256,634.77)	629,143,212.22
Jumlah	29,285,008,750.00	10,232,707,278.23	34.94	(19,052,301,471.77)	14,689,253,182.22

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per 31 Desember 2019 :

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum Merupakan PAD yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan, Retribusi Jasa umum dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.5 Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Retribusi Pelayanan Kesehatan	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925,496,987.00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1,000,000,000.00	1,159,991,000.00	116.00	159,991,000.00	889,486,000.00
Retribusi Penggantian Biaya KTP & Akte Pencatatan Sipil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum	800,000,000.00	556,200,000.00	69.53	(243,800,000.00)	648,800,000.00
Retribusi Pelayanan Pasar	210,000,000.00	232,043,000.00	110.50	22,043,000.00	221,537,000.00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3,900,000,000.00	1,447,064,500.00	37.10	(2,452,935,500.00)	1,491,394,750.00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	55,125,000.00	32,806,000.00	59.51	(22,319,000.00)	39,022,500.00
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	101,250,000.00	91,940,100.00	90.81	(9,309,900.00)	76,848,600.00
Jumlah	6,066,375,000.00	3,520,044,600.00	58.03	(2,546,330,400.00)	8,292,585,837.00

Anggaran pendapatan retribusi jasa umum sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp6.066.375.000,00 terealisasi sebesar Rp3.520.044.600,00 atau 58,03%. Realisasi yang tidak mencapai 50% dari target anggaran TA 2019 adalah Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor hal ini dikarenakan: alat kir rusak, sehingga mengganggu pelayanan dan penyesuaian akreditasi.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan PAD yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah, Retribusi Jasa usaha dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.6 Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	7,000,000,000.00	370,230,000.00	5.29	(6,629,770,000.00)	347,374,000.00
Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir/ Pertokoan	300,000,000.00	218,460,000.00	72.82	(81,540,000.00)	202,664,000.00
Retribusi Terminal	78,750,000.00	14,145,000.00	17.96	(64,605,000.00)	17,794,000.00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	17,640,000.00	0.00	0.00	(17,640,000.00)	0.00
Retribusi Jasa Usaha Tempat Penginapan/ Pesangrahan/ Villa	280,500,000.00	113,635,000.00	40.51	(166,865,000.00)	196,845,000.00
Retribusi Jasa Usaha Tempat Rumah Potong Hewan	50,000,000.00	16,000,000.00	32.00	(34,000,000.00)	17,400,000.00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	10,000,000,000.00	5,335,518,063.00	53.36	(4,664,481,937.00)	4,985,447,133.00
Retribusi Penyebrangan Air	424,462,500.00	0.00	0.00	(424,462,500.00)	0.00



Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi	0.00	16,650,000.00	0.00	16,650,000.00	0.00
Retribusi Pelayanan Tempat Pariwisata	50,000,000.00		0.00	(50,000,000.00)	0.00
Jumlah	18,201,352,500.00	6,084,638,063.00	33.43	(12,116,714,437.00)	5,767,524,133.00

Anggaran pendapatan retribusi jasa usaha sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp18.201.352.500,00 terealisasi sebesar Rp6.084.638.063,00 atau 33,43%.

Retribusi yang tidak mencapai 50% dari target anggaran tahun 2019 adalah Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Jasa Usaha Tempat Penginapan/Prasangrahan/Villa, Retribusi Jasa Usaha Tempat Rumah Potong Hewan, Retribusi Penyebrangan Air dan Retribusi Pelayanan Tempat Pariwisata.

1. Tidak tercapainya Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah dikarenakan :

- Untuk tahun 2019, gedung UPT BPSDM BKPP Kab. Bengkulu digunakan sebagai tempat pelaksanaan latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Bengkulu sebanyak 6 (enam) angkatan yang dimulai sejak bulan Juli 2019 sampai dengan Desember 2019. Oleh sebab itu UPT. BPSDM tidak menerima subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah dari orang/badan atau pihak luar. Sementara itu berdasarkan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu nomor 12 tahun 2019 dinyatakan bahwa "Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi/ badan yang menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah kecuali Instansi Pengelola". Sehingga pada saat pelaksanaan latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang diadakan oleh BKPP Kabupaten Bengkulu tersebut UPT BPSDM tidak bisa menerima subjek retribusi dari luar secara maksimal.
- Target yang ditetapkan terlalu tinggi kenaikannya dari tahun-tahun sebelumnya. Banyak kegiatan memakai jasa pihak ketiga dalam artian memakai ruang serba guna hotel yang ada di Bengkulu.

2. Tidak tercapainya Retribusi Terminal dikarenakan :

- Dari beberapa potensi pungutan retribusi yang ada di terminal, hanya retribusi dari angkot/ oplet yang keluar/ masuk terminal yang memberikan sumbangsih kepada PAD. Sementara dari sumber-sumber lain tidak ada realisasi pungutan. Hal ini dikarenakan kurang strategisnya letak terminal dengan pusat kegiatan ekonomi, sehingga tidak ada pihak-pihak yang mau memakai ruang, gedung ataupun tempat pada bagian terminal yang bisa dipungut retribusinya.

3. Tidak tercapainya Retribusi Tempat Khusus Parkir dikarenakan :

- Dalam hal ini dikarenakan belum adanya peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang retribusi parkir khusus.

4. Tidak tercapainya Retribusi Jasa Usaha Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa dikarenakan

- Disebabkan kondisi sarana dan prasarana gedung aula, ruang kelas dan kamar asrama, saat ini membuat sebagian besar calon penggunanya (subjek retribusi) memutuskan untuk memilih tempat lain.
- Belum terealisasi sesuai dengan target dikarenakan tarif kamar yang diberlakukan pada tahun 2019 masih dibawah standar penginapan pada umumnya. Kurangnya kesadaran dari penyewa akan pentingnya pembayaran retribusi ini, dan juga target yang ditetapkan untuk tahun 2019 masih tinggi.

5. Tidak tercapainya Retribusi Jasa Usaha Tempat Rumah Potong Hewan dikarenakan :

- Retribusi Rumah Potong Hewan hanya dipungut di kecamatan Bengkulu saja untuk tahun 2019, sementara Retribusi Rumah Potong Hewan untuk kecamatan Mandau tidak dipungut dikarenakan biaya untuk pemungutannya lebih besar melebihi hasil retribusi rumah potong hewan di Kecamatan Mandau.

6. Tidak tercapainya Retribusi Jasa Usaha Penyebrangan Air dikarenakan :

- Saat ini kapal KMP. Tasik Gemilang tidak lagi dikelola oleh pihak ketiga, sehingga tidak ada lagi biaya sewa terhadap kapal tersebut.



7. Tidak tercapainya Retribusi Pelayanan Tempat Pariwisata dikarenakan :

- Sampai saat ini baru retribusi kedai yang dipungut
- Retribusi tiket masuk belum bisa dipungut dikarenakan tidak adanya kegiatan di pantai "Selatbaru" setiap minggunya, jika dipaksakan dipungut takut berpengaruh pada pengunjung yang tidak mau masuk dan berpengaruh pada pendapatan para pemilik warung.
- Pintu gerbang masuk ke pantai "Selatbaru" masih sama juga dengan pintu masuk ke Pelabuhan Bandar Setia Raja Selatbaru sehingga tidak bisa membedakan mana pengunjung pantai dan mana yang mau ke pelabuhan.
- Pengelolaan parkir di pantai Selatbaru masih dibawah Dinas Perhubungan sehingga pendapatan dana parkir masuk ke Dinas Perhubungan.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu berhubungan dengan fungsi pemerintah daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Retribusi Perizinan Tertentu dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.7 Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Retribusi izin mendirikan Bangunan	5,000,000,000.00	624,204,615.23	12.48	(4,375,795,384.77)	549,668,817.22
Retribusi izin Gangguan/ Keramaian	0.00	0.00	0.00	0.00	76,679,395.00
Retribusi izin Trayek/ Kartu Pengawasan (KP)	13,781,250.00	3,820,000.00	27.72	(9,961,250.00)	2,145,000.00
Retribusi izin usaha perikanan	3,500,000.00	0.00	0.00	(3,500,000.00)	650,000.00
Jumlah	5,017,281,250.00	628,024,615.23	12.52	(4,389,256,634.77)	629,143,212.22

Anggaran pendapatan retribusi perizinan tertentu sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp5.017.281.250,00 terealisasi sebesar Rp628.024.615,23 atau 12,52%. Retribusi perizinan tertentu yang tidak mencapai target anggaran TA 2019 adalah:

1. Tidak tercapainya retribusi izin mendirikan bangunan dikarenakan :

- Pengesahan Peraturan Daerah Kab. Bengkalis nomor 13 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kab .Bengkalis nomor 14 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu disahkan diakhir tahun 2019. Sehingga belum dapat untuk dijadikan acuan dalam menetapkan tarif retribusi IMB di tahun 2019.
- Kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat, sehingga menyebabkan rendahnya partisipasi dan kesadaran akan pentingnya mengurus IMB.
- Masih lemahnya koordinasi antar instansi teknis terkait, sehingga belum maksimalnya pengawasan dan penertiban terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB.

2. Tidak tercapainya Retribusi Izin Trayek/ Kartu Pengawasan (KP) dikarenakan :

- Jumlah angkutan perkotaan/pedesaan yang beroperasi dalam wilayah Kab. Bengkalis berdasarkan jurusan/trayek yang telah ditetapkan, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami penurunan. Hal ini berdampak kepada realisasi penerimaan retribusi izin trayek yang juga mengalami penurunan. Keadaan ini diperburuk lagi dengan tumbuhnya angkutan-angkutan umum lainnya seperti angkutan khusus untuk karyawan dan angkutan online yang menyebabkan penumpang angkutan perkotaan/ pedesaan menjadi berkurang peminatnya, sehingga berakibat kepada penghasilan para supir angkot/ oplet untuk harian maupun mingguan dan bulanan.



3. Tidak tercapainya Retribusi Izin usaha perikanan dikarenakan :

- Masalah status lahan yang digunakan oleh pelaku usaha tambak udang "vanname" sebagian besar masih dalam kawasan hutan terbatas dan bertentangan dengan draft revisi rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkalis 2014-2034 yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016.
- Tidak keluarnya izin kesesuaian lokasi karena bertentangannya status lahan menyebabkan terkendalanya pelaku usaha untuk mengurus beberapa dokumen yang harus dipenuhi dalam pengurusan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya Perikanan diantaranya izin lingkungan dan izin lokasi.
- Proses pengurusan dokumen izin lingkungan dan dokumen lainnya yang memerlukan waktu yang lama sehingga tidak terkejutnya target yang ditetapkan untuk tahun 2019 dari 14 (empat belas) pelaku usaha yang mengurus izin lingkungan baru 4 (empat) izin lingkungan yang sudah terealisasi dihitung tanggal 18 Desember 2019.
- Izin Lingkungan merupakan syarat penting yang harus dipenuhi untuk menerbitkan izin lokasi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara Kabupaten Bengkalis, izin lokasi ini juga memerlukan waktu yang lama.
- Terlibatnya beberapa Perangkat Daerah dan instansi vertikal dalam proses pengurusan dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

SKPD yang mengelola Pendapatan Retribusi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.8 Rincian Retribusi per SKPD

SKPD	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Sekretariat Daerah	1,720,500,000.00	159,020,000.00	9.24	(1,561,480,000.00)	122,474,000.00
Dinas Kesehatan	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925,496,987.00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Badan Pendapatan Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	5,000,000,000.00	624,204,615.23	12.48	(4,375,795,384.77)	626,348,212.22
RSUD Bengkalis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RSUD Kecamatan Mandau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dinas Kelautan dan Perikanan	3,500,000.00	0.00	0.00	(3,500,000.00)	650,000.00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	560,000,000.00	26,875,000.00	4.80	(533,125,000.00)	120,650,000.00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	611,250,000.00	542,443,100.00	88.74	(68,806,900.00)	501,049,600.00
Dinas Lingkungan Hidup	1,000,000,000.00	1,159,991,000.00	116.00	159,991,000.00	889,486,000.00
Dinas Pertanian	50,000,000.00	16,000,000.00	32.00	(34,000,000.00)	17,400,000.00
Dinas Perhubungan	15,234,633,750.00	7,356,747,563.00	48.29	(7,877,886,187.00)	7,145,580,883.00



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5,000,000,000.00	297,970,000.00	5.96	(4,702,030,000.00)	301,095,000.00
Dinas Pemadam Kebakaran	55,125,000.00	32,806,000.00	59.51	(22,319,000.00)	39,022,500.00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	50,000,000.00	16,650,000.00	33.30	(33,350,000.00)	0.00
Jumlah	29,285,008,750.00	10,232,707,278.23	34.94	(19,052,301,471.77)	14,689,253,182.22

Realisasi akun pendapatan retribusi per SKPD dapat diuraikan sebagai berikut:

Sekretariat Daerah

Tabel 5.9 Rincian Retribusi Sekretariat Daerah

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah	1,500,000,000.00	53,560,000.00	3.57	(1,446,440,000.00)	23,279,000.00
Retribusi jasa usaha tempat penginapan/ pesangrahan/ villa	220,500,000.00	105,460,000.00	47.83	(115,040,000.00)	99,195,000.00
Jumlah	1,720,500,000.00	159,020,000.00	9.24	(1,561,480,000.00)	122,474,000.00

Dinas Kesehatan

Tabel 5.10 Rincian Retribusi Dinas Kesehatan

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Retribusi Pelayanan Kesehatan	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925,496,987.00
Jumlah	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925,496,987.00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 5.11 Rincian Retribusi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Retribusi Penggantian Biaya KTP & Akte Capil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu

Tabel 5.12 Rincian Retribusi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Retribusi izin mendirikan bangunan	5,000,000,000.00	624,204,615.23	12.48	(4,375,795,384.77)	549,668,817.22



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Retribusi izin gangguan/ keramaian	0.00	0.00	0.00	0.00	76,679,395.00
Jumlah	5,000,000,000.00	624,204,615.23	12.48	(4,375,795,384.77)	626,348,212.22



RSUD Bengkulu

Tabel 5.13 Rincian Retribusi RSUD Bengkulu

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Retribusi Pelayanan Kesehatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RSUD Kecamatan Mandau

Tabel 5.14 Rincian Retribusi RSUD Kecamatan Mandau

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Retribusi Pelayanan Kesehatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dinas Kelautan dan Perikanan

Tabel 5.15 Rincian Retribusi Dinas Kelautan dan Perikanan

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan	3,500,000.00	0.00	0.00	(3,500,000.00)	650,000.00
Jumlah	3,500,000.00	0.00	0.00	(3,500,000.00)	650,000.00

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 5.16 Rincian Retribusi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah	500,000,000.00	18,700,000.00	3.74	(481,300,000.00)	23,000,000.00
Retribusi jasa usaha tempat penginapan/ pesangrahan/ villa	60,000,000.00	8,175,000.00	13.63	(51,825,000.00)	97,650,000.00
Jumlah	560,000,000.00	26,875,000.00	4.80	(533,125,000.00)	120,650,000.00

Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Tabel 5.17 Rincian Retribusi Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Retribusi Pelayanan Pasar	210,000,000.00	232,043,000.00	110.50	22,043,000.00	221,537,000.00
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	101,250,000.00	91,940,100.00	90.81	(9,309,900.00)	76,848,600.00
Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir/ Pertokoan	300,000,000.00	218,460,000.00	72.82	(81,540,000.00)	202,664,000.00
Jumlah	611,250,000.00	542,443,100.00	88.74	(68,806,900.00)	501,049,600.00



Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 5.18 Rincian Retribusi Dinas Lingkungan Hidup

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	1,000,000,000.00	1,159,991,000.00	116.00	159,991,000.00	889,486,000.00
Jumlah	1,000,000,000.00	1,159,991,000.00	116.00	159,991,000.00	889,486,000.00

Dinas Pertanian

Tabel 5.19 Rincian Retribusi Dinas Pertanian

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Retribusi Jasa usaha tempat rumah potong hewan	50,000,000.00	16,000,000.00	32.00	(34,000,000.00)	17,400,000.00
Jumlah	50,000,000.00	16,000,000.00	32.00	(34,000,000.00)	17,400,000.00

Dinas Perhubungan

Tabel 5.20 Rincian Retribusi Dinas Perhubungan

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum	800,000,000.00	556,200,000.00	69.53	(243,800,000.00)	648,800,000.00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3,900,000,000.00	1,447,064,500.00	37.10	(2,452,935,500.00)	1,491,394,750.00
Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retribusi Terminal	78,750,000.00	14,145,000.00	17.96	(64,605,000.00)	17,794,000.00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	10,000,000,000.00	5,335,518,063.00	53.36	(4,664,481,937.00)	4,985,447,133.00
Retribusi izin Trayek/ Kartu Pengawasan (KP)	13,781,250.00	3,820,000.00	27.72	(9,961,250.00)	2,145,000.00
Retribusi Penyebrangan Air	424,462,500.00	0.00	0.00	(424,462,500.00)	0.00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	17,640,000.00	0.00	0.00	(17,640,000.00)	0.00
Jumlah	15,234,633,750.00	7,356,747,563.00	48.29	(7,877,886,187.00)	7,145,580,883.00



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 5.21 Rincian Retribusi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	5,000,000,000.00	297,970,000.00	5.96	(4,702,030,000.00)	301,095,000.00
Jumlah	5,000,000,000.00	297,970,000.00	5.96	(4,702,030,000.00)	301,095,000.00

Dinas Pemadam Kebakaran

Tabel 5.22 Rincian Retribusi Dinas Pemadam Kebakaran

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Retribusi Pemeriksa Alat Pemadam Kebakaran	55,125,000.00	32,806,000.00	59.51	(22,319,000.00)	39,022,500.00
Jumlah	55,125,000.00	32,806,000.00	59.51	(22,319,000.00)	39,022,500.00

Tabel 5.23 Rincian Retribusi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	50,000,000.00	16,650,000.00	33.30	(33,350,000.00)	0.00
Jumlah	50,000,000.00	16,650,000.00	33.30	(33,350,000.00)	0.00

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
40,000,000,000.00	28,788,248,654.00	71.97	(11,211,751,346.00)	31,369,321,102.00

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan yang berasal dari dividen sebesar Rp28.788.248.654,00 dari anggaran sebesar Rp40.000.000.000,00 atau 71,97% yang dibagikan oleh PT Bank Riau Kepri. Realisasi Pendapatan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.24 Pendapatan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
PT Bank Riau	40,000,000,000.00	28,788,248,654.00	71.97	(11,211,751,346.00)	31,369,321,102.00
PT Bumi Laksamana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	40,000,000,000.00	28,788,248,654.00	71.97	(11,211,751,346.00)	31,369,321,102.00

Penerimaan pendapatan dari hasil perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp28.788.248.654,00 atau 71,97% dari anggaran sebesar Rp40.000.000.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 menunjukkan adanya penurunan penerimaan sebesar Rp2.581.072,448,00 atau 8,23%. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dikelola oleh PPKD Kabupaten Bengkalis.

4. Lain-lain PAD yang sah

Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
171,285,664,377.00	120,175,536,704.60	70.16	(51,110,127,672.40)	207,229,800,808.64



Realisasi Lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.25 Realisasi Lain-Lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	400,000,000.00	382,150,000.00	95.54	(17,850,000.000)	0.00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penjualan Hasil Perikanan	1,500,000,000.00	557,782,000.00	37.19	(942,218,000.000)	397,070,000.00
Jasa Giro Kas Daerah	16,000,000,000.00	9,158,047,982.00	57.24	(6,841,952,018.000)	8,587,120,463.00
Jasa Giro Pemegang Kas	1,000,000,000.00	938,861,598.00	93.89	(61,138,402.000)	547,824,106.00
Pendapatan Bunga Deposito	2,210,000,000.00	2,983,980,005.00	135.02	773,980,005.00	0.00
Pendapatan Denda Pajak	0.00	511,420,368.00	0.00	511,420,368.00	576,754,047.00
Pendapatan dari Denda Keterlambatan bidang Pekerjaan Umum	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan dari Denda Keterlambatan bidang Perencanaan Pembangunan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hasil Eksekusi Jaminan	600,000,000.00	88,497,550.00	14.75	(511,502,450.00)	1,038,133,005.00
Pendapatan dari Pengembalian Belanja Pegawai	5,000,000,000.00	183,260,386.00	3.67	(4,816,739,614.00)	282,415,904.00
Pendapatan dari Pengembalian Belanja Barang dan Jasa	17,790,000,000.00	6,457,956,358.50	36.30	(11,332,043,641.50)	4,052,560,919.81
Pendapatan dari Pengembalian Belanja Modal	4,329,711,250.00	10,457,039,231.10	241.52	6,127,327,981.100	2,179,455,277.83
Pendapatan BLUD	107,760,000,000.00	74,729,082,176.00	69.35	(33,030,917,824.000)	100,530,426,003.00
Dana Kapitasi JKN pada FKTP	14,495,953,127.00	13,567,724,070.00	93.60	(928,229,057.000)	12,319,452,990.00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	200,000,000.00	159,734,980.00	79.87	(40,265,020.000)	129,708,093.00
Penerimaan Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Dana BOS dari Pusat	0.00	0.00	0.00	0.00	76,588,880,000.00
Jumlah	171,285,664,377.00	120,175,536,704.60	70.16	(51,110,127,672.40)	207,229,800,808.64



Penerimaan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp120.175.536.704,60 atau 70,16% dari nilai anggaran sebesar Rp171.285.664.377,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp207.229.800.808,64 menunjukkan adanya penurunan penerimaan sebesar Rp87.054.264.104,04 atau 42,01%. Pendapatan lain-lain PAD ini dikelola oleh beberapa SKPD sebagai berikut.

a) Badan Pendapatan Daerah

Tabel 5.26 Realisasi Lain-Lain PAD yang sah Badan Pendapatan Daerah

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Pendapatan Denda Pajak Hotel	0.00	11,470,954.00	0.00	11,470,954.00	0.00
Pendapatan Denda Pajak Restoran	0.00	6,175,024.00	0.00	6,175,024.00	0.00
Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LRA	0.00	403,704.00	0.00	403,704.00	0.00
Pendapatan Denda Pajak Reklame - LRA	0.00	1,394,625.00	0.00	1,394,625.00	0.00
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LRA	0.00	8,189,541.00	0.00	8,189,541.00	0.00
Pendapatan Denda PBB P2	0.00	483,775,420.00	0.00	483,775,420.00	576,754,047.00
Pendapatan Denda Pajak Walet	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00
Jumlah	0.00	511,420,368.00	0.00	511,420,368.00	576,754,047.00

b) Dinas Kesehatan

Tabel 5.27 Realisasi Lain-Lain PAD yang sah Dinas Kesehatan

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Dana Kapitasi JKN pada FKTP	14,495,953,127.00	13,567,724,070.00	93.60	(928,229,057.00)	12,319,452,990.00
Jumlah	14,495,953,127.00	13,567,724,070.00	93.60	(928,229,057.00)	12,319,452,990.00

c) RSUD Bengkulu

Tabel 5.28 Realisasi Lain-Lain PAD yang sah RSUD Bengkulu

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Pendapatan BLUD	52,760,000,000.00	41,135,545,419.00	77.97	(11,624,454,581.00)	60,063,402,819.00
Jumlah	52,760,000,000.00	41,135,545,419.00	77.97	(11,624,454,581.00)	60,063,402,819.00



d) RSUD Kecamatan Mandau

Tabel 5.29 Realisasi Lain-Lain PAD yang sah RSUD Kecamatan Mandau

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Pendapatan BLUD	55,000,000,000.00	33,593,536,757.00	61.08	(21,406,463,243.00)	40,467,023,184.00
Jumlah	55,000,000,000.00	33,593,536,757.00	61.08	(21,406,463,243.00)	40,467,023,184.00

e) Dinas Kelautan dan Perikanan

Tabel 5.30 Realisasi Lain-Lain PAD yang sah Dinas Kelautan dan Perikanan

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Penjualan Hasil Perikanan	1,500,000,000.00	557,782,000.00	37.19	(942,218,000.00)	397,070,000.00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0.00	545,454.00	0.00	545,454.00	1,636,362.00
Jumlah	1,500,000,000.00	558,327,454.00	37.22	(941,672,546.00)	398,706,362.00

f) PPKD

Tabel 5.31 Realisasi Lain-Lain PAD yang sah PPKD

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	400,000,000.00	382,150,000.00	95.54	(17,850,000.00)	0.00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jasa Giro Kas Daerah	16,000,000,000.00	9,158,047,982.00	57.24	(6,841,952,018.00)	8,587,120,463.00
Jasa Giro Pemegang Kas	1,000,000,000.00	938,861,598.00	93.89	(61,138,402.00)	547,824,106.00
Pendapatan Bunga Deposito	2,210,000,000.00	2,983,980,005.00	135.02	773,980,005.00	0.00
Pendapatan dari Denda Keterlambatan bidang Pekerjaan Umum	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan dari Denda Keterlambatan bidang Perencanaan Pembangunan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hasil Eksekusi Jaminan	600,000,000.00	88,497,550.00	14.75	(511,502,450.00)	1,038,133,005.00
Pendapatan dari Pengembalian Belanja Pegawai	5,000,000,000.00	183,260,386.00	3.67	(4,816,739,614.00)	282,415,904.00
Pendapatan dari Pengembalian Belanja Barang dan Jasa	17,790,000,000.00	6,457,956,358.50	36.30	(11,332,043,641.50)	4,052,560,919.81



Pendapatan dari Pengembalian Belanja Modal	4,329,711,250.00	10,457,039,231.10	241.52	6,127,327,981.10	2,179,455,277.83
Pendapatan Dana BOS dari Pusat	0.00	0.00	0.00	0.00	76,588,880,000.00
Penerimaan Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	200,000,000.00	0.00	0.00	(200,000,000.00)	0.00
Jumlah	47,529,711,250.00	30,649,793,110.60	64.49	(16,879,918,139.40)	93,276,389,675.64

g) Dinas Pendidikan

Tabel 5.32 Realisasi Lain-Lain PAD yang sah Dinas Pendidikan

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Pendapatan Dana BOS dari Pusat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

h) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 5.33 Realisasi Lain-Lain PAD yang sah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Penerimaan Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

i) Dinas Pertanian

Tabel 5.34 Realisasi Lain-Lain PAD yang sah Dinas Pertanian

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00
Jumlah	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00

j) Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Tabel 5.35 Realisasi Lain-Lain PAD yang sah Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0.00	47,220,181.00	0.00	47,220,181.00	33,693,249.00
Jumlah	0.00	47,220,181.00	0.00	47,220,181.00	33,693,249.00

k) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 5.36 Realisasi Lain-Lain PAD yang sah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0.00	51,969,345.00	0.00	51,969,345.00	34,378,482.00



Jumlah	0.00	51,969,345.00	0.00	51,969,345.00	34,378,482.00
--------	------	---------------	------	---------------	---------------

Penerimaan Lain-lain lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran Penerimaan Lain-lain

B. Pendapatan Transfer

Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
3,385,824,184,746.00	3,463,146,359,212.47	102.28	77,322,174,466.47	3,040,447,453,438.88

Pendapatan transfer merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pembagian hasil pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu. Realisasi pendapatan transfer per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.463.146.359.212,47 atau 102,28% dari anggaran sebesar Rp3.385.824.184.746,00, sementara realisasi pendapatan transfer per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.040.447.453.438,88.

Pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat-dana perimbangan dan transfer pemerintah pusat-lainnya serta transfer pemerintah provinsi. Rincian realisasi pendapatan transfer sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.37 Pendapatan Transfer

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	3,126,744,474,578.00	3,192,463,207,633.00	102.10	65,718,733,055.00	2,783,227,694,772.00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	131,071,696,000.00	131,071,695,996.00	100.00	(4.00)	144,783,974,996.00
Transfer Pemerintah Provinsi	128,008,014,168.00	139,611,455,583.47	109.06	11,603,441,415.47	112,435,783,670.88
Jumlah	3,385,824,184,746.00	3,463,146,359,212.47	102.28	77,322,174,466.47	3,040,447,453,438.88

1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
3,126,744,474,578.00	3,192,463,207,633.00	102.10	65,718,733,055.00	2,783,227,694,772.00

Berikut ini adalah rincian realisasi transfer pemerintah pusat-dana perimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018:

Tabel 5.38 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Bagi Hasil Pajak	1,358,802,771,340.00	1,416,335,599,329.00	104.23	57,532,827,989.00	1,436,254,223,765.00
Bagi Hasil Bukan Pajak	1,097,754,602,238.00	1,139,933,590,010.00	103.84	42,178,987,772.00	818,101,260,166.00
Dana Alokasi Umum	373,268,646,000.00	373,268,646,000.00	100.00	0.00	345,070,716,000.00
Dana Alokasi Khusus	296,918,455,000.00	262,925,372,294.00	88.55	(33,993,082,706.00)	183,801,494,841.00
Jumlah	3,126,744,474,578.00	3,192,463,207,633.00	102.10	65,718,733,055.00	2,783,227,694,772.00

per 31 Desember 2019 realisasi transfer pemerintah pusat-dana perimbangan adalah sebesar Rp3.192.463.207.633,00 atau 102,10% dari anggaran sebesar Rp3.126.744.474.578,00. Bila dibandingkan dengan realisasi selama tahun 2018 sebesar Rp2.783.227.694.772,00 terdapat kenaikan sejumlah Rp409.235.512.861,00 atau 14,70%, dengan rincian sebagai berikut:

a) Dana Bagi Hasil Pajak



Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
1,358,802,771,340.00	1,416,335,599,329.00	104.23	57,532,827,989.00	1,436,254,223,765.00

Realisasi Bagi Hasil Pajak sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.416.335.599.329,00 atau 104,23% dari anggaran sebesar Rp1.358.802.771.340,00 dan jika dibandingkan per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.436.254.223.765,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp19.918.624.436,00 atau 1,39%. Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu berasal dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PBB Pertambangan, Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, Pasal 25, Pasal 29 dan Wajib Pajak Orang Pribadi, PBB Perkebunan, PBB Perhutanan, PBB Bag. Pemerintah Pusat Bagi Rata, serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.39 Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Bagi Hasil PBB Non Migas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bagi Hasil PBB Pertambangan	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,961,274,522.00
Bagi Hasil PBB Perkebunan	0.00	0.00	0.00	0.00	10,361,763,118.00
Bagi Hasil PBB Perhutanan	0.00	0.00	0.00	0.00	6,521,430,350.00
Bagi Hasil Pajak PPh pasal 25/29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379,581,255.00
Bagi Hasil Pajak PPh pasal 21	0.00	0.00	0.00	0.00	44,742,325,005.00
Bagi Hasil Pajak PBB Bag. Pemerintah Pusat Bagi Rata	0.00	0.00	0.00	0.00	3,235,257,970.00
Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	52,591,545.00
Bagi Hasil dari PPH	33,701,990,000.00	24,297,369,146.00	72.09	(9,404,620,854.00)	0.00
Bagi Hasil dari PBB	1,325,100,781,340.00	1,392,038,230,183.00	105.05	66,937,448,843.00	0.00
Lainnya	1,358,802,771,340.00	1,416,335,599,329.00	104.23	57,532,827,989.00	1,436,254,223,765.00

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak selama sampai dengan 31 Desember 2019 dicatat berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan sebagai berikut :

- Bagi Hasil PBB dan PBB Pertambangan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180 tahun 2019 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran dana Bagi Hasil , Lampiran rincian perubahan alokasi DBH PBB, Bagi Rata sebesar Rp. 3.395.812.269,00. Bagian Daerah sebesar Rp1.458.689.629.175,00 dengan rincian Sektor Perkebunan sebesar Rp9.835.354.982,00, Sektor Perhutanan sebesar Rp5.529.606.831,00, Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp1.443.277.120.741,00, dan Sektor Lainnya sebesar Rp47.546.621,00. Biaya Pemungutan sebesar Rp48.762.989.658,00 dengan rincian Sektor Perkebunan sebesar Rp437.126.881,00, Sektor Perhutanan sebesar Rp215.040.265,00, Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp48.109.237.656,00, dan Sektor Lainnya sebesar Rp1.584.856,00.



Masih terdapat perbedaan antara Ketetapan sesuai dengan Perpres dan realisasi penerimaan yang masuk ke Kas Daerah (Kurang Salur/Lebih Salur).



- Bagi Hasil PPh 21, 25 dan 29

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180 tahun 2019 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran dana Bagi Hasil, Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2019 sebesar Rp47.670.082.659,00 dengan rincian PPh Pasal 25 sebesar Rp1.232.097.160,00 dan Dana Bagi Hasil Pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp46.437.985.499,00.

Masih terdapat perbedaan antara Ketetapan sesuai dengan Perpres dan realisasi penerimaan yang masuk ke Kas Daerah (Kurang Salur/Lebih Salur).

b) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA)

Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
1,097,754,602,238.00	1,139,933,590,010.00	103.84	42,178,987,772.00	818,101,260,166.00

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.139.933.590.010,00 atau 103,84% dari anggaran sebesar Rp1.097.754.602.238,00. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak ini merupakan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) seperti: Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan, Bagi Hasil dari Iuran Hak Penguasaan Hutan, Bagi Hasil dari Dana Reboisasi, Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti), Bagi Hasil dari Pungutan Perikanan, Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi, Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp818.101.260.166,00 mengalami kenaikan sebesar Rp321.832.329.844,00 atau 39,34%.

Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.40 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0.00	0.00	0.00	0.00	8,519,213,072.00
Bagi Hasil dari Iuran Hak Penguasaan Hutan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bagi Hasil Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813,824,579.00
Bagi Hasil dari Pungutan Pengusaha Perikanan	0.00	0.00	0.00	0.00	701,234,591.00
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	0.00	0.00	0.00	0.00	803,642,583,241.00
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	0.00	0.00	0.00	0.00	3,424,404,683.00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Migas	1,088,031,425,038.00	1,132,818,970,810.00	104.12	44,787,545,772.00	0.00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba	2,135,200,000.00	1,758,400,000.00	82.35	(376,800,000.00)	0.00



Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	836,054,050.00	590,155,800.00	70.59	(245,898,250.00)	0.00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	6,751,923,150.00	4,766,063,400.00	70.59	(1,985,859,750.00)	0.00
Jumlah	1,097,754,602,238.00	1,139,933,590,010.00	103.84	42,178,987,772.00	818,101,260,166.00

Realisasi Dana Bagi Hasil bukan Pajak sampai dengan 31 Desember 2019 dicatat berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan sebagai berikut :

- Bagi Hasil SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2019 sebesar Rp1.318.609.025.000,00 dengan rincian Minyak Bumi sebesar Rp1.312.137.860.000,00 dan Gas Bumi sebesar Rp6.471.165.000,00.

- Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180 tahun 2019 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran dana Bagi Hasil, Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2019 sebesar Rp2.339.956.335,00 dengan Rincian Royalti sebesar Rp2.339.956.335,00.

- Bagi Hasil SDA Perikanan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180 tahun 2019 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran dana Bagi Hasil, Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2019 sebesar Rp931.411.605,00.

- Bagi Hasil dari Provisi Daya Hutan dan Dana Reboisasi

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180 tahun 2019 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran dana Bagi Hasil, Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2019 sebesar Rp7.943.439.111,00 dengan Rincian IUPH sebesar Rp0,00, PSDH sebesar Rp7.943.439.111,00 dan DR sebesar Rp0,00.

Masih terdapat perbedaan antara Ketentuan sesuai dengan Perpres dan PMK dengan realisasi penerimaan yang masuk ke Kas Daerah (Kurang Salur/Lebih Salur).

c) Dana Alokasi Umum (DAU)

Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
373,268,646,000.00	373,268,646,000.00	100.00	0.00	345,070,716,000.00

Pemerintah Kabupaten Bengkulu menerima Dana Alokasi Umum pada Tahun Anggaran 2019 dicatat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 Lampiran XIV tentang Rincian Dana Alokasi Umum Menurut Provinsi / Kabupaten / Kota sebesar Rp373.268.646.000,00. Jumlah realisasi Dana Alokasi Umum yang diterima Pemerintah Kabupaten Bengkulu sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.41 Dana Alakosi Umum (DAU)

DAU	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Dana Alokasi Umum	373,268,646,000.00	373,268,646,000.00	100.00	0.00	345,070,716,000.00
Jumlah	373,268,646,000.00	373,268,646,000.00	100.00	0.00	345,070,716,000.00



d) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
296,918,455,000.00	262,925,372,294.00	88.55	(33,993,082,706.00)	183,801,494,841.00

Pemerintah Kabupaten Bengkalis menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sampai dengan 31 Desember 2019 dicatat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2019 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 Lampiran XV dan Lampiran XVI sebesar Rp296.918.455.000,00. Jumlah realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima Pemerintah Kabupaten Bengkalis sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp262.925.372.294,00 atau 88,54% dari anggarannya sebesar Rp296.918.455.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

i). Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik

Tabel 5.42 Dana Alakosi Khusus (DAK) - Fisik

DAK Fisik	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
DAK Bidang Infrastruktur Jalan	49,696,265,000.00	48,174,991,580.00	96.94	(1,521,273,420.000)	19,570,155,000.00
DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	0.00	0.00	0.00	0.00	2,491,868,000.00
DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	11,671,762,000.00	10,034,128,377.00	85.97	(1,637,633,623.000)	3,241,373,000.00
DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	1,500,000,000.00	1,314,900,000.00	87.66	(185,100,000.000)	0.00
DAK Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	16,974,040,000.00	16,363,720,515.00	96.40	(610,319,485.000)	5,187,525,000.00
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	886,030,000.00	0.00	0.00	(886,030,000.000)	733,139,000.00
DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	733,352,000.00	725,538,306.00	98.93	(7,813,694.000)	452,355,000.00
DAK Bidang Transportasi Perdesaan	2,850,001,000.00	20,625,010.00	0.72	-2,829,375,990.00	0.00
DAK Bidang Pariwisata	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,746,300.00
DAK Bidang Pasar	2,690,287,000.00	2,508,252,135.00	93.23	(182,034,865.000)	0.00
DAK Bidang Pertanian	0.00	0.00	0.00	0.00	928,019,000.00
DAK Bidang Kesehatan	22,614,942,000.00	18,849,667,658.00	83.35	(3,765,274,342.000)	0.00
DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1,837,500,000.00	1,829,200,000.00	99.55	(8,300,000.000)	0.00
DAK Bidang Sarana Prasarana Irigasi dan Air Minum	1,019,950,000.00	986,913,100.00	96.76	(33,036,900.000)	0.00
DAK Bidang Pendidikan	20,779,843,000.00	20,764,156,993.00	99.92	(15,686,007.000)	7,389,458,100.00
DAK Bidang Afirmasi Kesehatan	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370,464,880.00
DAK Bidang Afirmasi Penguatan Puskesmas	11,179,841,000.00	0.00	0.00	(11,179,841,000.000)	0.00



Jumlah	144,433,813,000.00	121,572,093,674.00	84.17	(22,861,719,326.00)	46,567,103,280.00
---------------	---------------------------	---------------------------	--------------	----------------------------	--------------------------

ii). Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Tabel 5.43 Dana Alakosi Khusus (DAK) - Non Fisik

DAK Non Fisik	Menurut Surat Ketetapan	Realisasi Penerimaan	Dasar Hukum
Tunjangan Profesi PNSD Guru	108,974,432,000.00	101,402,190,500.00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 Lampiran XVI tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Provinsi / Kabupaten / Kota dalam APBN T.A. 2019
Dana Tambahan Penghasilan Guru	1,610,000,000.00	1,094,000,000.00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 Lampiran XVI tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Provinsi / Kabupaten / Kota dalam APBN T.A. 2019
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	7,713,000,000.00	7,583,400,000.00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 Lampiran XVI tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Provinsi / Kabupaten / Kota dalam APBN T.A. 2019
Bantuan Operasional Kesehatan	9,151,754,000.00	8,609,485,000.00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 Lampiran XVI tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Provinsi / Kabupaten / Kota dalam APBN T.A. 2019
Akreditasi Puskesmas	1,457,530,000.00	1,418,193,730.00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 Lampiran XVI tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Provinsi / Kabupaten / Kota dalam APBN T.A. 2019
Jaminan Persalinan	4,366,000,000.00	2,822,525,840.00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 Lampiran XVI tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Provinsi / Kabupaten / Kota dalam APBN T.A. 2019
Bantuan Operasional KB	2,731,960,000.00	2,070,183,550.00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 Lampiran XVI tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Provinsi / Kabupaten / Kota dalam APBN T.A. 2019
Tunjangan Khusus Guru	13,301,060,000.00	13,301,060,000.00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 Lampiran XVI tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Provinsi / Kabupaten / Kota dalam APBN T.A. 2019
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	816,036,000.00	689,370,000.00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 Lampiran XVI tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Provinsi / Kabupaten / Kota dalam APBN T.A. 2019
DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1,610,700,000.00	1,610,700,000.00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 Lampiran XVI tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Provinsi / Kabupaten / Kota dalam APBN T.A. 2019
DAK Dana Pelayanan Kepariwisataan	752,170,000.00	752,170,000.00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 Lampiran XVI tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Provinsi / Kabupaten / Kota dalam APBN T.A. 2019
Jumlah	152,484,642,000.00	141,353,278,620.00	

[Lampiran Dana Perimbangan](#)



2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
131,071,696,000.00	131,071,695,996.00	100.00	(4.00)	144,783,974,996.00

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya merupakan Dana Penyesuaian yang terdiri dari Insentif Daerah dan Dana Desa yang ditetapkan berdasarkan ketetapan sebagai berikut:

a) Dana Penyesuaian

Tabel 5.44 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - Dana Penyesuaian

Uraian	Menurut Surat Ketetapan	Realisasi Penerimaan	Dasar Hukum
Dana Insentif Daerah	0.00	0.00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 Lampiran XVII tentang Rincian Dana Insentif Daerah Menurut Provinsi / Kabupaten / Kota.
Dana Desa dan Desa Adat	131,071,696,000.00	131,071,695,996.00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 Lampiran XVIII tentang Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten / Kota.
Jumlah	131,071,696,000.00	131,071,695,996.00	

Penerimaan yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp131.071.695.996,00 mengalami penurunan sebesar Rp13.712.279.000,00 atau 9,47% bila dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar Rp144.783.975.000,00.

3. Transfer Pemerintah Provinsi

Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
128,008,014,168.00	139,611,455,583.47	109.06	11,603,441,415.47	112,435,783,670.88

Realisasi transfer Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

a). Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
119,948,014,168.00	131,841,460,583.47	109.92	11,893,446,415.47	105,619,783,670.88

Penerimaan yang berasal dari transfer Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp131.841.460.583,47 atau 109,92% dari anggaran sebesar Rp119.948.014.168,00, mengalami kenaikan sebesar Rp26.221.676.912,59 atau 24,83% bila dibandingkan realisasi tahun 2018 yang berjumlah Rp105.619.783.670,88.

Tabel 5.45 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Transfer Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Pajak Kendaraan Bermotor	28,792,616,333.00	36,034,090,053.62	125.15	7,241,473,720.62	25,000,497,217.38
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	21,880,225,702.00	25,625,132,014.75	117.12	3,744,906,312.75	19,971,368,838.25
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	48,568,134,505.00	47,740,866,175.75	98.30	(827,268,329.25)	39,746,225,530.25
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	1,922,718,228.00	1,347,251,693.35	70.07	(575,466,534.65)	649,000,374.00
Pajak Rokok	18,784,319,400.00	21,094,120,646.00	112.30	2,309,801,246.00	20,252,691,711.00
Jumlah	119,948,014,168.00	131,841,460,583.47	109.92	11,893,446,415.47	105,619,783,670.88



Realisasi dana bagi hasil dari selama sampai dengan 31 Desember 2019 dicatat berdasarkan ketetapan peraturan-peraturan sebagai berikut:

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 733 / V / 2018 tanggal 07 Mei 2019 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan I untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019 yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp7.265.919.406,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp6.171.874.552,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp10.017.313.859,00, dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp187.777.554,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 746 / V / 2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (Desember) tahun 2018 untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.937.769.009,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 747 / V / 2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.738.795.541,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 912 / VIII / 2019 tanggal 05 Agustus 2019 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan II untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019 yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp7.198.336.277,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp5.701.318.690,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp10.576.901.324,00, dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp198.535.950,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 924 / VIII / 2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan II untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp6.102.917.657,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1173 / XI / 2019 tanggal 5 November 2019 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan III untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.664.144.246

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1174 / XI / 2019 tanggal 05 November 2019 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Desember 2018) tahun 2019 untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019 yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.534.848.106,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.981.836.083,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp3.657.672.027,00, dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp98.460.422,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1192 / XI / 2019 tanggal 18 November 2019 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan III untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019 yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp8.013.762.835,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp5.290.982.218,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp10.450.269.267,00, dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp216.628.716,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1269 / XII / 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Oktober-November) untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019 yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp5.774.829.135,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp3.270.813.218,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp7.313.942.430,00, dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp133.910.717,00.



Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1173 / XI / 2019 tanggal 5 November 2019 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.650.494.193,00.

b). Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi

Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
8,060,000,000.00	7,769,995,000.00	96.40	(290,005,000.00)	6,816,000,000.00

Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp7.769.995.000,00 atau 96,40% dari anggarannya sebesar Rp8.060.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp953.995.000,00 atau 14,00% bila dibandingkan realisasi tahun 2018 yang berjumlah Rp6.816.000.000,00 yang berasal dari PPKD.

Tabel 5.46 Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	8,060,000,000.00	7,769,995,000.00	96.40	(290,005,000.00)	6,816,000,000.00
Jumlah	8,060,000,000.00	7,769,995,000.00	96.40	(290,005,000.00)	6,816,000,000.00

Pengalokasian Bantuan Keuangan untuk Kabupaten Bengkalis ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Riau No: KPTS.1166/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 sebagaimana diubah dengan keputusan Gubernur Riau No:KPTS.1075/IX/2019 tanggal 25 September 2019 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Berupa Gaji Guru Bantu kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019.

Dalam keputusan tersebut ditetapkan Alokasi Bantuan Keuangan untuk Kabupaten Bengkalis tahun 2019 adalah sebesar Rp8.060.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp7.769.995.000,00 atau 96,40% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.47 Rincian Realisasi Bantuan Keuangan per SKPD

SKPD	Alokasi Anggaran	Realisasi 2019	%	Kurang/Lebih	Realisasi 2018
Dinas Pendidikan	8,060,000,000.00	7,769,995,000.00	96.40	(290,005,000.00)	6,816,000,000.00
Jumlah	8,060,000,000.00	7,769,995,000.00	96.40	(290,005,000.00)	6,816,000,000.00

C. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
86,287,600,000.00	85,045,520,000.00	98.56	(1,242,080,000.00)	0.00

Lain-lain Pendapatan yang Sah pada tahun 2019 adalah sebesar Rp85.045.520.000,00 atau 98,56% dari anggaran sebesar Rp86.287.600.000,00 dan realisasi tahun 2018 yang berjumlah Rp0,00.

Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.48 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Pendapatan Hibah	86,287,600,000.00	85,045,520,000.00	98.56	(1,242,080,000.00)	0.00
Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	86,287,600,000.00	85,045,520,000.00	98.56	(1,242,080,000.00)	0.00



5.1.2. Belanja

Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Kurang/Lebih	Realisasi 2018
3,592,819,496,326.65	3,300,154,218,224.97	91.85	292,665,278,101.68	2,749,971,464,672.27

Realisasi Belanja Kabupaten Bengkulu per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.300.154.218.224,97 atau 91,85% dari nilai anggaran sebesar Rp3.592.819.496.326,65. Jika dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp2.749.971.464.672,27 mengalami kenaikan sebesar Rp550.182.753.552,70 atau 20,01% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.49 Belanja dan Transfer

Belanja	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Kurang/Lebih	Realisasi 2018
Belanja Operasi	2,374,493,419,263.80	2,191,978,637,329.98	92.31	182,514,781,933.82	1,846,310,915,885.95
Belanja Modal	1,217,603,885,303.19	1,108,175,580,894.99	91.01	109,428,304,408.20	903,407,348,786.32
Belanja Tidak Terduga	722,191,759.66	0.00	0.00	722,191,759.66	253,200,000.00
Jumlah	3,592,819,496,326.65	3,300,154,218,224.97	91.85	292,665,278,101.68	2,749,971,464,672.27

A. Belanja Operasi

Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Kurang/Lebih	Realisasi 2018
2,374,493,419,263.80	2,191,978,637,329.98	92.31	182,514,781,933.82	1,846,310,915,885.95

Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Bengkulu per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.191.978.637.329,98 atau 92,31% dari nilai anggaran sebesar Rp2.374.493.419.263,80. Jika dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp1.846.310.915.885,95 mengalami kenaikan sebesar Rp345.667.721.444,03 atau 18,72% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.50 Belanja Operasi

Belanja Operasi	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Kurang/Lebih	Realisasi 2018
Belanja Pegawai	1,129,688,959,682.00	1,077,884,549,964.00	95.41	51,804,409,718.00	900,644,081,702.00
Belanja Barang dan Jasa	1,167,274,130,973.80	1,041,554,003,106.98	89.23	125,720,127,866.82	886,830,058,508.95
Belanja Subsidi	10,895,753,608.00	10,895,753,608.00	100.00	0.00	12,776,416,390.00
Belanja Hibah	63,384,575,000.00	59,946,830,651.00	94.58	3,437,744,349.00	46,060,359,285.00
Belanja Bantuan Sosial	3,250,000,000.00	1,697,500,000.00	52.23	1,552,500,000.00	0.00
Jumlah	2,374,493,419,263.80	2,191,978,637,329.98	92.31	182,514,781,933.82	1,846,310,915,885.95

1. Belanja Pegawai

Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Kurang/Lebih	Realisasi 2018
1,129,688,959,682.00	1,077,884,549,964.00	95.41	51,804,409,718.00	900,644,081,702.00

Realisasi belanja pegawai selama sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.077.884.549.964,00 atau 95,41% dari anggaran sebesar Rp1.129.688.959.682,00. Jika dibandingkan realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp900.644.081.702,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp177.240.468.262,00 atau 19,68%.

Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut :



Tabel 5.51 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Kurang/Lebih	Realisasi 2018
Belanja Gaji dan Tunjangan	487,576,317,519.00	473,298,338,919.00	97.07	14,277,978,600.00	459,622,508,632.00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	623,600,068,913.00	593,556,168,335.00	95.18	30,043,900,578.00	429,961,579,999.00
Belanja Penerimaan Lainnya					
Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	10,279,302,000.00	8,898,360,000.00	86.57	1,380,942,000.00	8,857,620,000.00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	7,060,750,000.00	1,885,245,210.00	26.70	5,175,504,790.00	2,001,033,000.00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1,172,521,250.00	246,437,500.00	21.02	926,083,750.00	201,340,071.00
Jumlah	1,129,688,959,682.00	1,077,884,549,964.00	95.41	51,804,409,718.00	900,644,081,702.00

Rincian Belanja Pegawai berdasarkan SKPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.52 Rincian Belanja Pegawai Per SKPD

SKPD	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Kurang/Lebih	Realisasi 2018
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	25,053,367,978.00
Kepala dan Wakil Kepala Daerah	772,560,947.00	757,644,950.00	98.07	14,915,997.00	761,937,662.00
Sekretariat Daerah	33,079,364,198.00	28,069,599,845.00	84.86	5,009,764,353.00	18,888,775,804.00
Sekretariat DPRD	47,318,971,254.00	38,956,179,772.00	82.33	8,362,791,482.00	12,237,861,566.00
Dinas Kesehatan	82,320,140,211.00	76,007,682,152.00	92.33	6,312,458,059.00	57,756,911,569.00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7,749,225,000.00	7,478,144,842.00	96.50	271,080,158.00	6,111,399,900.00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7,931,942,757.00	7,799,443,723.00	98.33	132,499,034.00	6,422,508,454.00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7,905,738,535.00	7,677,581,892.00	97.11	228,156,643.00	6,309,592,626.00
Badan Pendapatan Daerah	21,728,628,236.00	14,908,474,294.00	68.61	6,820,153,942.00	12,923,287,766.00
Satuan Polisi Pamong Praja	11,420,496,347.00	10,584,448,745.00	92.68	836,047,602.00	9,066,324,738.00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7,155,778,271.00	6,953,748,588.00	97.18	202,029,683.00	5,330,113,713.00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6,113,310,110.00	5,472,085,282.00	89.51	641,224,828.00	4,382,957,229.00
Dinas Ketahanan Pangan	4,905,765,847.00	4,829,497,162.00	98.45	76,268,685.00	4,087,296,869.00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4,904,814,927.00	4,781,370,590.00	97.48	123,444,337.00	3,804,797,124.00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	8,773,215,000.00	8,528,282,121.00	97.21	244,932,879.00	6,660,312,140.00
Badan Penelitian dan Pengembangan	4,518,109,349.00	4,324,671,647.00	95.72	193,437,702.00	3,241,544,923.00
Dinas Pendidikan	576,265,089,706.00	573,126,613,555.00	99.46	3,138,476,151.00	489,273,672,700.00
Dinas Kelautan dan Perikanan	7,657,787,537.00	7,362,650,381.00	96.15	295,137,156.00	5,837,085,636.00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6,364,534,380.00	6,312,330,170.00	99.18	52,204,210.00	4,451,504,648.00
Inspektorat	7,118,721,894.00	6,701,017,932.00	94.13	417,703,962.00	5,479,359,278.00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	9,124,931,517.00	9,028,473,082.00	98.94	96,458,435.00	7,408,383,123.00
Dinas Sosial	8,179,201,068.00	8,021,173,498.00	98.07	158,027,570.00	5,839,914,639.00
RSUD Bengkalis	36,780,409,599.00	32,766,159,714.00	89.09	4,014,249,885.00	28,796,903,242.00
RSUD Kecamatan Mandau	30,149,108,307.00	29,769,849,444.00	98.74	379,258,863.00	27,682,588,057.00
Kecamatan Mandau	12,799,233,995.00	12,189,447,517.00	95.24	609,786,478.00	9,528,720,222.00
Kecamatan Rupal	7,840,840,784.00	6,097,391,234.00	77.76	1,743,449,550.00	4,553,016,974.00
Kecamatan Rupal Utara	3,795,395,828.00	3,687,104,304.00	97.15	108,291,524.00	2,840,446,707.00
Kecamatan Bengkalis	7,957,197,752.00	7,574,217,795.00	95.19	382,979,957.00	6,174,186,633.00
Kecamatan Bukit Batu	4,362,246,829.00	4,180,704,398.00	95.84	181,542,431.00	3,451,587,944.00
Kecamatan Bantan	3,576,494,629.00	3,444,959,243.00	96.32	131,535,386.00	2,811,044,148.00
Kecamatan Siak Kecil	3,594,225,939.00	3,396,296,617.00	94.49	197,929,322.00	2,807,624,362.00
Kecamatan Pinggir	4,253,346,667.00	4,117,504,095.00	96.81	135,842,572.00	3,307,893,929.00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	7,261,656,703.00	6,716,679,169.00	92.50	544,977,534.00	5,726,705,143.00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	9,700,021,517.00	9,221,868,814.00	95.07	478,152,703.00	6,995,526,494.00
Dinas Lingkungan Hidup	9,475,036,943.00	9,294,114,245.00	98.09	180,922,698.00	7,373,797,001.00
Dinas Pertanian	16,609,911,850.00	16,185,887,146.00	97.45	424,024,704.00	13,572,157,620.00
Dinas Perhubungan	14,036,505,780.00	12,977,498,621.00	92.46	1,059,007,159.00	10,256,904,388.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13,349,330,197.00	12,651,683,094.00	94.77	697,647,103.00	10,146,698,848.00
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	8,320,546,078.00	8,140,338,310.00	97.83	180,207,768.00	6,548,810,984.00



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6,172,294,509.00	6,038,858,471.00	97.84	133,436,038.00	4,592,849,201.00
Dinas Pemadam Kebakaran	6,353,835,582.00	5,899,061,017.00	92.84	454,774,565.00	3,983,570,251.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5,466,301,205.00	4,812,529,008.00	88.04	653,772,197.00	3,798,836,084.00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	27,073,481,603.00	23,407,592,216.00	86.46	3,665,889,387.00	21,280,076,168.00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5,391,534,690.00	5,330,124,158.00	98.86	61,410,532.00	4,370,224,913.00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	6,653,659,169.00	5,415,185,182.00	81.39	1,238,473,987.00	4,089,175,033.00
Kecamatan Bandar Laksamana	2,535,044,267.00	2,363,355,481.00	93.23	171,688,786.00	1,509,526,389.00
Kecamatan Talang Muandau	2,231,666,689.00	2,106,280,304.00	94.38	125,386,385.00	1,188,998,386.00
Kecamatan Bathin Solapan	2,641,305,480.00	2,418,746,144.00	91.57	222,559,336.00	1,927,302,496.00
Jumlah	1,129,688,959,682.00	1,077,884,549,964.00	95.41	51,804,409,718.00	900,644,081,702.00

2. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Kurang/Lebih	Realisasi 2018
1,167,274,130,973.80	1,041,554,003,106.98	89.23	125,720,127,866.82	886,830,058,508.95

Realisasi belanja barang sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.041.554.003.106,98 atau 89,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.167.274.130.973,80, jika dibandingkan TA 2018 sebesar Rp886.830.058.508,95 mengalami kenaikan Rp154.723.944.598,03 atau 17,45%.

Belanja barang dan jasa merupakan pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa yang digunakan/dimanfaatkan kurang dari 12 (dua belas) bulan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah yang terdiri dari belanja barang habis pakai, bahan material, jasa kantor, perawatan kendaraan bermotor, biaya cetak, penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan, makanan dan minuman, pakaian dinas dan kelengkapan pakaian dinas serta perjalanan dinas dan lain-lain. Rincian realisasi belanja barang dan jasa sebagai berikut :

Tabel 5.53 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Kurang/Lebih	Realisasi 2018
Belanja Bahan Habis Pakai	58,097,124,194.00	53,498,269,458.36	92.08	4,598,854,735.64	44,406,600,091.47
Belanja Bahan/ Material	46,970,509,551.00	43,502,793,417.94	92.62	3,467,716,133.06	46,715,015,983.00
Belanja Jasa Kantor	365,725,542,602.00	331,804,370,276.00	90.72	33,921,172,326.00	328,825,767,731.82
Belanja Premi Asuransi	1,920,835,880.00	1,504,413,364.00	78.32	416,422,516.00	1,291,711,928.00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31,899,697,400.00	26,784,475,559.00	83.96	5,115,221,841.00	22,769,496,612.73



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Belanja Cetak dan Penggandaan	18,385,073,360.00	15,898,790,411.00	86.48	2,486,282,949.00	13,003,395,460.00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6,090,663,870.00	4,990,494,683.00	81.94	1,100,169,187.00	3,269,179,116.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,032,964,000.00	2,527,870,882.00	83.35	505,093,118.00	1,763,397,500.00
Belanja Sewa Alat Berat	197,375,800.00	196,544,000.00	99.58	831,800.00	199,630,000.00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4,281,984,000.00	3,762,995,500.00	87.88	518,988,500.00	3,092,639,700.00
Belanja Makanan dan Minuman	52,461,400,083.00	47,487,068,080.00	90.52	4,974,332,003.00	36,919,295,763.00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1,763,650,000.00	1,668,388,800.00	94.60	95,261,200.00	994,348,600.00
Belanja Pakaian Kerja	2,546,945,000.00	2,261,711,100.00	88.80	285,233,900.00	1,539,933,000.00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	4,353,677,330.00	4,115,037,430.00	94.52	238,639,900.00	3,756,384,688.00
Belanja Perjalanan Dinas	190,952,895,614.80	171,618,053,707.00	89.87	19,334,841,907.80	118,810,333,560.00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00	0.00	381,103,666.00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	12,269,261,000.00	10,791,199,212.00	87.95	1,478,061,788.00	4,974,142,620.00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis Non PNS	0.00	0.00	0.00	0.00	306,611,000.00
Belanja Perjalanan Pindah Tugas	92,500,000.00	45,235,000.00	48.90	47,265,000.00	55,535,000.00
Belanja Pemeliharaan	6,806,196,900.00	5,908,648,522.00	86.81	897,548,378.00	25,280,725,025.00
Belanja Jasa Konsultasi	15,243,269,850.00	12,874,548,917.00	84.46	2,368,720,933.00	22,250,464,177.00
Belanja Barang Dana BOS	46,001,955,000.00	40,449,864,233.00	87.93	5,552,090,767.00	35,833,947,094.00
Belanja Pemeliharaan Kesehatan	8,242,870,975.00	7,535,086,083.00	91.41	707,784,892.00	254,582,007.00
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	104,403,062,864.00	92,227,000,525.00	88.34	12,176,062,339.00	15,377,359,908.00
Belanja Barang yang akan dijual kepada pihak ketiga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Honorarium PNS	14,490,730,000.00	12,949,115,000.00	89.36	1,541,615,000.00	11,770,920,052.00
Honorarium Non PNS	40,470,252,200.00	35,677,263,100.00	88.16	4,792,989,100.00	29,227,933,788.00
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	14,593,353,500.00	14,248,301,200.00	97.64	345,052,300.00	14,761,233,000.00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULUSALATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Belanja barang dan dana BOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Tugas Kedinasan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Pegawai BLUD	7,009,800,000.00	4,617,339,550.00	65.87	2,392,460,450.00	3,693,910,000.00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	91,750,200,000.00	71,970,744,057.68	78.44	19,779,455,942.32	77,400,352,864.93
Belanja Barang Dana BOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Pegawai Dana BOS	17,195,340,000.00	20,613,381,039.00	119.88	(3,418,041,039.00)	17,904,108,573.00
Jumlah	1,167,274,130,973.80	1,041,554,003,106.98	89.23	125,720,127,866.82	886,830,058,508.95

Rincian Belanja Barang dan Jasa berdasarkan SKPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.54 Rincian Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan SKPD

SKPD	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Kurang/Lebih	Realisasi 2018
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kepala dan Wakil Kepala Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sekretariat Daerah	100,749,071,375.00	94,893,006,630.00	94.19	5,856,064,745.00	85,125,788,042.00
Sekretariat DPRD	72,349,906,049.00	66,606,770,865.00	92.06	5,743,135,184.00	48,675,949,902.00
Dinas Kesehatan	78,654,545,492.00	63,990,230,747.00	81.36	14,664,314,745.00	76,185,331,013.82
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10,830,887,700.00	9,986,012,595.00	92.20	844,875,105.00	7,755,137,307.00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4,638,653,000.00	4,564,742,711.00	98.41	73,910,289.00	3,112,427,060.00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13,489,686,226.00	10,477,740,918.00	77.67	3,011,945,308.00	7,196,773,378.00
Badan Pendapatan Daerah	20,157,438,814.00	13,348,982,986.00	66.22	6,808,455,828.00	8,792,610,044.00
Satuan Polisi Pamong Praja	15,186,356,104.00	13,638,409,108.00	89.81	1,547,946,996.00	11,253,380,557.00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7,094,942,367.00	6,553,097,955.00	92.36	541,844,412.00	3,481,475,360.00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	33,358,436,153.00	29,843,876,059.00	89.46	3,514,560,094.00	25,487,935,949.00
Dinas Ketahanan Pangan	4,814,371,010.00	4,605,477,798.00	95.66	208,893,212.00	4,159,779,966.00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3,614,586,000.00	2,943,773,021.00	81.44	670,812,979.00	2,816,514,778.00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	17,803,884,100.00	16,549,879,239.00	92.96	1,254,004,861.00	14,738,911,563.00
Badan Penelitian dan Pengembangan	3,705,745,854.00	3,474,509,661.00	93.76	231,236,193.00	2,587,533,887.00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Pendidikan	170,142,547,810.00	157,836,751,336.00	92.77	12,305,796,474.00	152,773,463,516.00
Dinas Kelautan dan Perikanan	8,998,894,258.00	7,287,842,742.00	80.99	1,711,051,516.00	7,495,554,227.00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10,113,899,000.00	9,535,402,808.00	94.28	578,496,192.00	4,426,160,207.00
Inspektorat	7,186,951,834.00	5,410,334,439.00	75.28	1,776,617,395.00	4,635,126,860.00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	8,598,249,425.00	7,716,584,532.00	89.75	881,664,893.00	5,617,126,881.00
Dinas Sosial	38,463,012,040.00	37,014,342,781.00	96.23	1,448,669,259.00	44,466,576,783.00
RSUD Bengkalis	84,885,963,425.00	71,444,566,335.00	84.17	13,441,397,090.00	74,117,299,377.40
RSUD Kecamatan Mandau	84,736,221,500.00	65,408,376,583.98	77.19	19,327,844,916.02	58,425,305,446.00
Kecamatan Mandau	18,081,996,413.00	17,926,182,688.00	99.14	155,813,725.00	12,948,241,440.00
Kecamatan Rupat	6,771,914,350.00	6,606,357,428.00	97.56	165,556,922.00	4,442,830,006.00
Kecamatan Rupat Utara	5,707,933,580.00	5,571,800,575.00	97.62	136,133,005.00	3,584,688,000.00
Kecamatan Bengkalis	5,482,573,230.00	5,336,664,533.00	97.34	145,908,697.00	4,649,030,565.00
Kecamatan Bukit Batu	4,137,471,800.00	3,971,551,130.00	95.99	165,920,670.00	3,509,925,780.00
Kecamatan Bantan	2,982,845,020.00	2,941,810,467.00	98.62	41,034,553.00	2,044,784,100.00
Kecamatan Siak Kecil	2,985,652,600.00	2,963,602,900.00	99.26	22,049,700.00	2,390,795,300.00
Kecamatan Pinggir	4,523,038,300.00	4,341,285,876.00	95.98	181,752,424.00	3,942,945,533.00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	13,062,455,545.00	9,494,027,728.00	72.68	3,568,427,817.00	5,397,413,238.00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	16,987,462,005.00	15,269,386,715.00	89.89	1,718,075,290.00	10,100,575,792.00
Dinas Lingkungan Hidup	29,751,159,226.00	29,194,760,864.00	98.13	556,398,362.00	24,591,002,821.00
Dinas Pertanian	11,652,374,630.00	10,660,756,267.00	91.49	991,618,363.00	9,887,591,948.00
Dinas Perhubungan	22,004,369,696.00	15,594,615,221.00	70.87	6,409,754,475.00	13,132,835,162.73
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15,619,507,406.80	12,922,984,003.00	82.74	2,696,523,403.80	34,406,822,747.00
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	113,022,092,800.00	108,617,106,689.00	96.10	4,404,986,111.00	31,789,605,970.00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6,298,015,400.00	5,642,469,763.00	89.59	655,545,637.00	3,947,770,414.00
Dinas Pemadam Kebakaran	10,419,836,060.00	10,187,088,035.00	97.77	232,748,025.00	10,037,022,463.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8,418,902,500.00	7,223,754,029.00	85.80	1,195,148,471.00	4,117,287,025.00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	42,194,075,240.00	39,312,932,364.00	93.17	2,881,142,876.00	29,678,276,131.00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9,210,588,394.00	7,714,358,219.00	83.76	1,496,230,175.00	5,735,111,377.00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	9,221,775,174.00	8,475,356,215.00	91.91	746,418,959.00	6,957,021,099.00
Kecamatan Bandar Laksamana	2,862,985,350.00	2,831,072,985.00	98.89	31,912,365.00	2,143,021,053.00
Kecamatan Talang Muandau	3,474,473,300.00	2,857,120,637.00	82.23	617,352,663.00	2,216,939,914.00
Kecamatan Bathin Solapan	2,826,383,418.00	2,766,245,926.00	97.87	60,137,492.00	1,852,358,526.00
Jumlah	1,167,274,130,973.80	1,041,554,003,106.98	89.23	125,720,127,866.82	886,830,058,508.95



3. Belanja Subsidi

Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Kurang/Lebih	Realisasi 2018
10,895,753,608.00	10,895,753,608.00	100.00	0.00	12,776,416,390.00

Realisasi belanja subsidi sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp10.895.753.608,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp10.895.753.608,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.880.662.782,00 atau 14,72% dibandingkan realisasi TA 2018 yang berjumlah Rp12.776.416.390,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.55 Belanja Subsidi

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Kurang/Lebih	Realisasi 2018
Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	10,895,753,608.00	10,895,753,608.00	100.00	0.00	12,776,416,390.00
Jumlah	10,895,753,608.00	10,895,753,608.00	100.00	0.00	12,776,416,390.00

4. Belanja Hibah

Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Kurang/Lebih	Realisasi 2018
63,384,575,000.00	59,946,830,651.00	94.58	3,437,744,349.00	46,060,359,285.00

Realisasi belanja hibah sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp59.946.830.651,00 atau 94,58% dari anggaran sebesar Rp63.384.575.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp13.886.471.366,00 atau 30,15% dibandingkan realisasi TA 2018 sebesar Rp46.060.359.285,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.56 Belanja Hibah

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Kurang/Lebih	Realisasi 2018
Belanja Hibah kepada Pemerintah	22,000,000,000.00	22,000,000,000.00	100.00	0.00	19,393,988,601.00
Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan	22,650,000,000.00	20,590,267,479.00	90.91	2,059,732,521.00	20,170,770,684.00
Belanja Hibah Kepada Kelompok/ Anggota Masyarakat	7,015,000,000.00	6,057,888,172.00	86.36	957,111,828.00	0.00
Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	2,395,875,000.00	2,351,775,000.00	98.16	44,100,000.00	0.00
BOP PAUD Masyarakat / Swasta	7,713,000,000.00	7,336,200,000.00	95.11	376,800,000.00	6,495,600,000.00
BOP Pendidikan Kesetaraan	1,610,700,000.00	1,610,700,000.00	100.00	0.00	0.00
Jumlah	63,384,575,000.00	59,946,830,651.00	94.58	3,437,744,349.00	46,060,359,285.00



5. Belanja Bantuan Sosial

Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Kurang/Lebih	Realisasi 2018
3,250,000,000.00	1,697,500,000.00	52.23	1,552,500,000.00	0.00

Realisasi belanja bantuan sosial sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.697.500.000,00 atau 52,23% dari anggaran sebesar Rp3.250.000.000,00 dan realisasi TA 2018 berjumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.57 Belanja Bantuan Sosial

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Kurang/ Lebih	Realisasi 2018
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	3,250,000,000.00	1,697,500,000.00	52.23	1,552,500,000.00	0.00
Jumlah	3,250,000,000.00	1,697,500,000.00	52.23	1,552,500,000.00	0.00

B. Belanja Modal

Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Kurang/Lebih	Realisasi 2018
1,217,603,885,303.19	1,108,175,580,894.99	91.01	109,428,304,408.20	903,407,348,786.32

Realisasi belanja modal sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.108.175.580.894,99 atau 91,01% dari anggaran sebesar Rp1.217.603.885.303,19 dan mengalami kenaikan sebesar Rp204.768.232.108,67 atau 22,67% dari realisasi TA 2018 sebesar Rp903.407.348.786,32 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.58 Belanja Modal

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Kurang/ Lebih	Realisasi 2018
Belanja Tanah	15,071,813,588.00	9,634,892,400.00	63.93	5,436,921,188.00	2,016,855,072.00
Belanja Peralatan dan Mesin	181,364,774,968.00	159,391,025,569.48	87.88	21,973,749,398.52	143,542,877,947.32
Belanja Gedung dan Bangunan	287,814,700,655.00	254,922,045,126.71	88.57	32,892,655,528.29	201,503,179,612.00
Belanj Jalan, Irigasi dan Jaringan	719,974,431,992.19	671,190,951,973.80	93.22	48,783,480,018.39	551,045,934,750.00
Belanja Aset Tetap Lainnya	13,378,164,100.00	13,036,665,825.00	97.45	341,498,275.00	5,298,501,405.00
Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	1,217,603,885,303.19	1,108,175,580,894.99	91.01	109,428,304,408.20	903,407,348,786.32

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas bulan) untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Rincian realisasi modal berdasarkan jenis aset tetap dan hak kepemilikannya tahun Anggaran 2019. Adapun realisasi belanja modal selama sampai dengan 31 Desember 2019 dan TA 2018 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Belanja Tanah

Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Kurang/Lebih	Realisasi 2018
15,071,813,588.00	9,634,892,400.00	63.93	5,436,921,188.00	2,016,855,072.00

Realisasi belanja modal tanah sebesar Rp9.634.892.400,00 atau 63,93% dari anggaran sebesar Rp15.071.813.588,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp7.618.037.328,00 atau 377,72% dari realisasi TA 2018 sebesar Rp2.016.855.072,00.

Realisasi belanja modal tanah sebesar Rp9.634.892.400,00 merupakan belanja modal tanah dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.59 Belanja Tanah

Belanja Tanah	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Kurang/Lebih	Realisasi 2018
Belanja modal Pengadaan Tanah Perkampungan	0.00	0.00	0.00	0.00	514,440,000.00
Belanja modal Pengadaan Kolam Ikan	0.00	0.00	0.00	0.00	892,429,000.00
Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	1,018,849,000.00	680,818,500.00	66.82	338,030,500.00	394,476,250.00
Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain	14,052,964,588.00	8,954,073,900.00	63.72	5,098,890,688.00	215,509,822.00
Jumlah	15,071,813,588.00	9,634,892,400.00	63.93	5,436,921,188.00	2,016,855,072.00

Rincian Belanja Modal Tanah berdasarkan SKPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.60 Rincian Belanja Modal Tanah berdasarkan SKPD

SKPD	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Kurang/Lebih	Realisasi 2018
Dinas Kesehatan	1,018,849,000.00	680,818,500.00	66.82	338,030,500.00	394,476,250.00
Dinas Pendidikan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dinas Kelautan dan Perikanan	0.00	0.00	0.00	0.00	892,429,000.00
Dinas Sosial	0.00	0.00	0.00	0.00	514,440,000.00
Dinas Perhubungan	2,000,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000,000.00	0.00
Kecamatan Bandar Laksamana	2,302,350,000.00	1,108,377,900.00	48.14	1,193,972,100.00	119,269,822.00
Kecamatan Talang Muandau	2,166,194,588.00	314,030,000.00	14.50	1,852,164,588.00	17,930,000.00
Kecamatan Bathin Solapan	7,584,420,000.00	7,531,666,000.00	99.30	52,754,000.00	78,310,000.00
Jumlah	15,071,813,588.00	9,634,892,400.00	63.93	5,436,921,188.00	2,016,855,072.00

2. Belanja Peralatan dan Mesin

Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Kurang/Lebih	Realisasi 2018
181,364,774,968.00	159,391,025,569.48	87.88	21,973,749,398.52	143,542,877,947.32

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp159.391.025.569,48 atau 87,88% dari anggaran sebesar Rp181.364.774.968,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp15.848.147.622,16 atau 11,04% dari realisasi TA 2018 sebesar Rp143.542.877.947,32.

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp159.391.025.569,48 merupakan belanja modal peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.61 Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Kurang/Lebih	Realisasi 2018
Belanja modal Pengadaan Alat- Alat Besar Darat	1,162,655,100.00	1,159,024,100.00	99.69	3,631,000.00	29,700,000.00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Belanja modal Pengadaan Alat- Alat Besar Apung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja modal Pengadaan Alat- alat Bantu	2,873,035,000.00	2,640,199,200.71	91.90	232,835,799.29	1,717,758,510.00
Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	17,557,856,900.00	16,667,471,318.00	94.93	890,385,582.00	13,568,860,475.00
Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	938,000,000.00	937,891,000.00	99.99	109,000.00	0.00
Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900,000.00
Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara	70,000,000.00	63,930,000.00	91.33	6,070,000.00	0.00
Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	41,600,000.00	41,495,000.00	99.75	105,000.00	0.00
Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	99,380,000.00	98,357,850.00	98.97	1,022,150.00	149,950,900.00
Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	694,600,000.00	569,842,500.00	82.04	124,757,500.00	662,109,000.00
Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	1,386,870,000.00	1,350,755,000.00	97.40	36,115,000.00	44,200,000.00
Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	73,900,000.00	73,850,000.00	99.93	50,000.00	49,800,000.00
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	9,523,705,200.00	9,189,197,170.00	96.49	334,508,030.00	7,889,229,337.00
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	20,381,132,780.00	13,539,255,015.00	66.43	6,841,877,765.00	12,630,176,191.00
Belanja modal Pengadaan Komputer	14,661,028,550.00	13,849,837,570.00	94.47	811,190,980.00	8,937,143,163.00
Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10,537,013,600.00	10,212,705,370.00	96.92	324,308,230.00	7,260,559,070.00
Belanja modal Pengadaan Alat Studio	5,653,290,630.00	5,390,565,860.00	95.35	262,724,770.00	2,276,701,500.00
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	229,080,000.00	226,754,200.00	98.98	2,325,800.00	82,940,000.00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	0.00	0.00
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	40,232,545,084.00	36,469,200,220.77	90.65	3,763,344,863.23	44,160,654,329.47
Belanja Modal Pengadaan Unit- unit Laboratorium	1,297,360,000.00	1,264,078,800.00	97.43	33,281,200.00	5,629,292,378.44
Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	1,204,900,000.00	1,170,597,513.00	97.15	34,302,487.00	2,350,262,926.00
Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kerja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	5,554,920,000.00	5,528,859,300.00	99.53	26,060,700.00	7,469,698,957.00
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	79,050,000.00	78,900,000.00	99.81	150,000.00	271,880,000.00
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0.00	0.00	0.00	0.00	138,300,000.00
Belanja modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	166,800,000.00	155,540,000.00	93.25	11,260,000.00	0.00
Belanja modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00	0.00	11,495,000.00
Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	231,497,124.00	231,032,430.00	99.80	464,694.00	17,480,000.00
Belanja Modal BLUD	9,000,000,000.00	4,463,176,466.00	49.59	4,536,823,534.00	5,329,705,882.41
Belanja Modal Dana BOS	37,702,555,000.00	34,006,509,686.00	90.20	3,696,045,314.00	22,853,080,328.00
Jumlah	181,364,774,968.00	159,391,025,569.48	87.88	21,973,749,398.52	143,542,877,947.32

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin berdasarkan SKPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.62 Rincian Belanja Peralatan dan Mesin Berdasarkan SKPD

SKPD	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Kurang/ Lebih	Realisasi 2018
Sekretariat Daerah	8,369,019,000.00	8,208,166,365.00	98.08	160,852,635.00	7,206,875,590.00
Sekretariat DPRD	6,944,080,000.00	6,587,720,200.00	94.87	356,359,800.00	7,525,001,600.00
Dinas Kesehatan	11,620,472,063.00	10,468,610,336.71	90.09	1,151,861,726.29	17,501,751,590.07



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,993,720,000.00	1,819,106,795.00	91.24	174,613,205.00	2,820,371,754.00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	400,000,000.00	396,960,000.00	99.24	3,040,000.00	783,722,400.00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3,535,790,000.00	3,238,218,800.00	91.58	297,571,200.00	194,150,000.00
Badan Pendapatan Daerah	3,157,617,500.00	2,859,658,650.00	90.56	297,958,850.00	1,303,243,500.00
Satuan Polisi Pamong Praja	516,547,000.00	497,463,900.00	96.31	19,083,100.00	447,974,500.00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	645,500,000.00	635,573,000.00	98.46	9,927,000.00	264,586,000.00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2,475,600,000.00	2,462,902,715.00	99.49	12,697,285.00	24,090,000.00
Dinas Ketahanan Pangan	34,860,000.00	34,860,000.00	100.00	0.00	0.00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	68,125,000.00	64,070,000.00	94.05	4,055,000.00	0.00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1,369,500,000.00	1,363,682,000.00	99.58	5,818,000.00	391,910,000.00
Badan Penelitian dan Pengembangan	256,440,000.00	245,465,000.00	95.72	10,975,000.00	51,600,000.00
Dinas Pendidikan	47,822,222,900.00	43,998,197,686.00	92.00	3,824,025,214.00	36,201,177,886.00
Dinas Kelautan dan Perikanan	274,175,000.00	262,234,000.00	95.64	11,941,000.00	88,800,000.00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	416,950,000.00	394,306,000.00	94.57	22,644,000.00	143,757,000.00
Inspektorat	222,660,000.00	183,645,000.00	82.48	39,015,000.00	0.00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	694,457,000.00	629,488,500.00	90.64	64,968,500.00	37,400,000.00
Dinas Sosial	756,472,500.00	747,013,777.00	98.75	9,458,723.00	0.00
RSUD Bengkulu	32,770,939,401.00	29,673,437,032.00	90.55	3,097,502,369.00	20,949,559,057.00
RSUD Kecamatan Mandau	11,747,349,000.00	7,095,757,336.77	60.40	4,651,591,663.23	24,735,646,795.25
Kecamatan Mandau	2,290,824,320.00	2,233,660,970.00	97.50	57,163,350.00	733,711,700.00
Kecamatan Rupa	1,340,786,000.00	1,323,997,300.00	98.75	16,788,700.00	106,273,000.00
Kecamatan Rupa Utara	1,315,520,000.00	1,291,201,900.00	98.15	24,318,100.00	1,094,331,500.00
Kecamatan Bengkulu	689,743,800.00	688,653,800.00	99.84	1,090,000.00	307,075,000.00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kecamatan Bukit Batu	137,200,000.00	135,850,000.00	99.02	1,350,000.00	397,710,000.00
Kecamatan Bantan	302,577,800.00	302,317,800.00	99.91	260,000.00	242,697,500.00
Kecamatan Siak Kecil	165,050,000.00	164,050,000.00	99.39	1,000,000.00	516,453,000.00
Kecamatan Pinggir	22,500,000.00	22,495,000.00	99.98	5,000.00	199,500,000.00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	30,000,000.00	27,100,000.00	90.33	2,900,000.00	29,796,000.00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1,379,500,000.00	1,239,050,800.00	89.82	140,449,200.00	385,550,000.00
Dinas Lingkungan Hidup	2,908,685,100.00	2,893,612,406.00	99.48	15,072,694.00	434,666,400.00
Dinas Pertanian	874,700,000.00	849,085,000.00	97.07	25,615,000.00	76,105,000.00
Dinas Perhubungan	443,540,000.00	439,316,000.00	99.05	4,224,000.00	1,135,751,700.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,098,500,000.00	1,038,457,500.00	94.53	60,042,500.00	687,075,000.00
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	432,925,000.00	390,150,000.00	90.12	42,775,000.00	308,400,000.00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	246,450,000.00	243,575,420.00	98.83	2,874,580.00	0.00
Dinas Pemadam Kebakaran	869,260,000.00	856,787,000.00	98.57	12,473,000.00	217,371,800.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7,134,492,124.00	720,357,830.00	10.10	6,414,134,294.00	17,480,000.00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	16,963,054,150.00	16,348,609,850.00	96.38	614,444,300.00	11,991,729,175.00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	509,096,000.00	494,810,000.00	97.19	14,286,000.00	276,990,000.00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	5,235,974,310.00	4,943,019,900.00	94.40	292,954,410.00	1,340,861,000.00
Kecamatan Bandar Laksamana	136,400,000.00	136,150,000.00	99.82	250,000.00	666,205,000.00
Kecamatan Talang Muandau	745,500,000.00	742,180,000.00	99.55	3,320,000.00	1,337,638,000.00
Kecamatan Bathin Solapan	0.00	0.00	0.00	0.00	367,889,500.00
Jumlah	181,364,774,968.00	159,391,025,569.48	87.88	21,973,749,398.52	143,542,877,947.32

3. Belanja Gedung dan Bangunan

Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Kurang/Lebih	Realisasi 2018
287,814,700,655.00	254,922,045,126.71	88.57	32,892,655,528.29	201,503,179,612.00



Realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp254.922.045.126,71 atau 88,57% dari anggaran sebesar Rp287.814.700.655,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp53.418.865.514,71 atau 26,51% dari realisasi TA 2018 sebesar Rp201.503.179.612,00.

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp254.922.045.126,71 merupakan belanja modal gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.63 Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Kurang/Lebih	Realisasi 2018
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	275,119,710,255.00	242,996,168,267.10	88.32	32,123,541,987.90	177,931,954,130.00
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	8,921,235,000.00	8,324,373,361.61	93.31	596,861,638.39	9,057,550,500.00
Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	1,455,884,000.00	1,354,831,700.00	93.06	101,052,300.00	8,346,523,500.00
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	180,000,000.00	175,374,000.00	97.43	4,626,000.00	392,442,000.00
Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	904,371,400.00	847,654,760.00	93.73	56,716,640.00	849,872,762.00
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,567,520.00
Belanja Modal Pengadaan Monumen / Bangunan Bersejarah	1,233,500,000.00	1,223,643,038.00	99.20	9,856,962.00	3,587,269,200.00
Jumlah	287,814,700,655.00	254,922,045,126.71	88.57	32,892,655,528.29	201,503,179,612.00

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan berdasarkan SKPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.64 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan berdasarkan SKPD

SKPD	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Sekretariat Daerah	13,450,150,000.00	12,779,411,357.00	95.01	670,738,643.00	11,844,299,700.00
Sekretariat DPRD	4,033,695,000.00	3,737,141,000.00	92.65	296,554,000.00	3,086,281,000.00
Dinas Kesehatan	46,163,175,168.00	27,544,155,680.65	59.67	18,619,019,487.35	12,579,324,832.00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,217,920,000.00	1,203,409,616.00	98.81	14,510,384.00	815,172,432.00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	723,000,000.00	707,016,319.22	97.79	15,983,680.78	281,171,000.00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	958,000,000.00	546,741,760.00	57.07	411,258,240.00	0.00
Badan Pendapatan Daerah	683,000,000.00	613,842,000.00	89.87	69,158,000.00	43,510,000.00
Satuan Polisi Pamong Praja	309,100,000.00	307,390,000.00	99.45	1,710,000.00	106,320,000.00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1,745,596,320.00	1,728,770,500.00	99.04	16,825,820.00	0.00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1,386,891,400.00	1,310,660,760.00	94.50	76,230,640.00	1,225,900,000.00
Dinas Ketahanan Pangan	0.00	0.00	0.00	0.00	38,427,425.00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16,150,000.00	15,147,963.00	93.80	1,002,037.00	0.00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	5,156,500,000.00	5,134,398,438.00	99.57	22,101,562.00	11,037,983,643.00
Badan Penelitian dan Pengembangan	305,840,000.00	305,109,000.00	99.76	731,000.00	139,100,000.00
Dinas Pendidikan	83,200,031,600.00	76,947,764,202.77	92.49	6,252,267,397.23	68,186,492,953.00
Dinas Kelautan dan Perikanan	1,974,820,000.00	1,967,925,000.00	99.65	6,895,000.00	1,491,768,000.00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1,845,558,420.00	1,817,315,700.00	98.47	28,242,720.00	2,313,121,000.00
Inspektorat	198,000,000.00	194,762,500.00	98.36	3,237,500.00	195,600,000.00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	1,281,000,000.00	1,212,862,000.00	94.68	68,138,000.00	45,254,000.00
Dinas Sosial	484,600,000.00	479,329,000.00	98.91	5,271,000.00	2,932,898,000.00
RSUD Bengkulu	7,766,200,000.00	4,088,789,000.00	52.65	3,677,411,000.00	2,788,616,550.00
RSUD Kecamatan Mandau	10,869,720,000.00	10,614,743,117.94	97.65	254,976,882.06	5,252,363,200.00
Kecamatan Mandau	3,765,952,700.00	3,739,231,000.00	99.29	26,721,700.00	0.00
Kecamatan Rupal	5,420,516,060.00	5,379,562,300.00	99.24	40,953,760.00	896,695,000.00
Kecamatan Rupal Utara	1,149,895,000.00	1,148,055,000.00	99.84	1,840,000.00	1,690,994,000.00
Kecamatan Bengkulu	197,575,000.00	197,112,000.00	99.77	463,000.00	863,120,000.00
Kecamatan Bukit Batu	647,982,000.00	646,526,000.00	99.78	1,456,000.00	147,300,000.00
Kecamatan Bantan	0.00	0.00	0.00	0.00	381,021,638.00
Kecamatan Siak Kecil	359,175,000.00	358,355,000.00	99.77	820,000.00	834,604,000.00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kecamatan Pinggir	64,000,000.00	63,380,000.00	99.03	620,000.00	1,546,729,000.00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	79,850,000.00	79,150,000.00	99.12	700,000.00	318,800,000.00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	4,084,924,500.00	3,961,210,335.00	96.97	123,714,165.00	497,750,000.00
Dinas Lingkungan Hidup	3,345,768,400.00	3,338,195,000.00	99.77	7,573,400.00	1,245,619,600.00
Dinas Pertanian	692,800,000.00	687,563,600.00	99.24	5,236,400.00	4,003,055,005.00
Dinas Perhubungan	13,687,796,996.00	13,140,203,704.08	96.00	547,593,291.92	27,733,759,841.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	61,334,515,093.00	60,097,479,403.05	97.98	1,237,035,689.95	31,472,530,843.00
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	2,808,200,000.00	2,581,459,750.00	91.93	226,740,250.00	2,941,744,950.00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	343,550,000.00	341,474,000.00	99.40	2,076,000.00	575,641,000.00
Dinas Pemadam Kebakaran	1,275,000,000.00	1,272,770,000.00	99.83	2,230,000.00	661,670,000.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	718,940,000.00	701,694,000.00	97.60	17,246,000.00	0.00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2,459,000,000.00	2,354,818,000.00	95.76	104,182,000.00	431,731,000.00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	991,891,998.00	963,732,120.00	97.16	28,159,878.00	711,406,000.00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	618,420,000.00	613,389,000.00	99.19	5,031,000.00	145,404,000.00
Kecamatan Bandar Laksamana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kecamatan Talang Muandau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kecamatan Bathin Solapan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	287,814,700,655.00	254,922,045,126.71	88.57	32,892,655,528.29	201,503,179,612.00



4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Kurang/Lebih	Realisasi 2018
719,974,431,992.19	671,190,951,973.80	93.22	48,783,480,018.39	551,045,934,750.00

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan Jaringan sebesar Rp671.190.951.973,80 atau 93,22% dari anggaran sebesar Rp719.974.431.992,19 dan mengalami kenaikan sebesar Rp120.145.017.223,80 atau 21,80% dari realisasi TA 2018 sebesar Rp551.045.934.750,00.

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp671.190.951.973,80 merupakan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.65 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Kurang/Lebih	Realisasi 2018
Belanja modal Pengadaan Jalan	576,865,819,847.00	560,474,983,699.49	97.16	16,390,836,147.51	375,693,992,054.00
Belanja modal Pengadaan Jembatan	8,614,744,900.00	8,255,584,286.00	95.83	359,160,614.00	7,548,677,537.00
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	17,274,430,765.19	16,373,172,813.60	94.78	901,257,951.59	45,588,983,311.00
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Rawa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	8,351,883,000.00	8,288,903,889.00	99.25	62,979,111.00	10,009,299,986.00
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466,690,200.00
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	47,406,217,292.00	39,838,774,051.35	84.04	7,567,443,240.65	55,780,560,951.00
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	26,212,860,265.00	24,931,525,175.92	95.11	1,281,335,089.08	48,995,288,059.00
Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	352,152,700.00	331,120,800.00	94.03	21,031,900.00	200,600,000.00
Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	0.00	0.00	0.00	0.00	70,920,000.00
Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	723,240,000.00	720,430,000.00	99.61	2,810,000.00	0.00
Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	25,000,000.00	14,126,600.00	56.51	10,873,400.00	98,013,000.00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Belanja modal Pengadaan Instalasi Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman	122,100,000.00	119,650,000.00	97.99	2,450,000.00	0.00
Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	492,560,000.00	483,019,280.00	98.06	9,540,720.00	213,500,000.00
Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	33,533,423,223.00	11,359,661,378.44	33.88	22,173,761,844.56	5,379,409,652.00
Jumlah	719,974,431,992.19	671,190,951,973.80	93.22	48,783,480,018.39	551,045,934,750.00

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan SKPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.66 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan SKPD

SKPD	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Kurang/Lebih	Realisasi 2018
Sekretariat Daerah	324,600,000.00	315,425,000.00	97.17	9,175,000.00	394,471,000.00
Sekretariat DPRD	297,000,000.00	295,570,000.00	99.52	1,430,000.00	0.00
Dinas Kesehatan	426,240,000.00	424,860,000.00	99.68	1,380,000.00	0.00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	40,000,000.00	39,770,280.00	99.43	229,720.00	0.00
Badan Pendapatan Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	59,526,000.00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	30,000,000.00	29,943,100.00	99.81	56,900.00	0.00
Dinas Pendidikan	180,000,000.00	179,500,000.00	99.72	500,000.00	261,920,000.00
Dinas Kelautan dan Perikanan	45,000,000.00	14,126,600.00	31.39	30,873,400.00	205,795,000.00
Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	272,695,000.00	267,545,000.00	98.11	5,150,000.00	0.00
Kecamatan Mandau	1,837,085,680.00	1,822,036,300.00	99.18	15,049,380.00	0.00
Kecamatan Rupa	2,667,464,200.00	2,666,014,200.00	99.95	1,450,000.00	0.00
Kecamatan Rupa Utara	0.00	0.00	0.00	0.00	198,400,000.00
Kecamatan Bengkalis	1,948,371,370.00	1,896,592,900.00	97.34	51,778,470.00	0.00
Kecamatan Bukit Batu	515,900,800.00	514,630,800.00	99.75	1,270,000.00	0.00
Kecamatan Siak Kecil	96,050,000.00	95,622,000.00	99.55	428,000.00	0.00
Kecamatan Pinggir	1,011,085,800.00	998,100,000.00	98.72	12,985,800.00	9,700,000.00



Dinas Lingkungan Hidup	0.00	0.00	0.00	0.00	105,450,000.00
Dinas Pertanian	6,485,140,000.00	6,460,743,000.00	99.62	24,397,000.00	6,337,823,000.00
Dinas Perhubungan	50,000,000.00	49,929,000.00	99.86	71,000.00	1,616,318,500.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	511,115,743,719.19	490,046,134,963.95	95.88	21,069,608,755.24	307,801,688,618.00
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	192,632,055,423.00	165,074,408,829.85	85.69	27,557,646,593.15	234,039,842,632.00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
Jumlah	719,974,431,992.19	671,190,951,973.80	93.22	48,783,480,018.39	551,045,934,750.00

5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Kurang/Lebih	Realisasi 2018
13,378,164,100.00	13,036,665,825.00	97.45	341,498,275.00	5,298,501,405.00

Realisasi belanja modal Aset tetap lainnya sebesar Rp13.036.665.825,00 atau 97,45% dari anggaran sebesar Rp13.378.164.100,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp7.738.164.420,00 atau 146,04% dari realisasi TA 2018 sebesar Rp5.298.501.405,00.

Realisasi belanja modal Aset tetap lainnya sebesar Rp13.036.665.825,00 merupakan belanja modal Aset Tetap lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.67 Belanja Aset Tetap Lainnya

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Kurang/Lebih	Realisasi 2018
Belanja modal Pengadaan Buku	12,967,664,100.00	12,626,725,825.00	97.37	340,938,275.00	5,141,891,405.00
Belanja modal Pengadaan Tanaman	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	403,000,000.00	402,960,000.00	99.99	40,000.00	156,610,000.00
Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	7,500,000.00	6,980,000.00	93.07	520,000.00	0.00
Jumlah	13,378,164,100.00	13,036,665,825.00	97.45	341,498,275.00	5,298,501,405.00

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berdasarkan SKPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.68 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berdasarkan SKPD

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Kurang/Lebih	Realisasi 2018
Sekretariat Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	198,660,000.00
Sekretariat DPRD	0.00	0.00	0.00	0.00	198,643,500.00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0.00	0.00	0.00	0.00	983,897,705.00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Badan					
Perencanaan	7,500,000.00	6,980,000.00	93.07	520,000	0.00
Pembangunan					
Daerah					
Dinas					
Pemberdayaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Masyarakat dan					
Desa					
Dinas Pariwisata,					
Kebudayaan,	400,000,000.00	399,960,000.00	99.99	40,000.00	0.00
Kepemudaan					
dan Olahraga					



Dinas Pendidikan	12,855,654,100.00	12,516,626,025.00	97.36	339,028,075.00	3,904,240,200.00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	0.00	4,500,000.00
Kecamatan Mandau	52,800,000.00	52,799,000.00	100.00	1,000.00	8,560,000.00
Kecamatan Rupa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kecamatan Bengkulu	26,210,000.00	26,210,000.00	100.00	0.00	0.00
Kecamatan Bukit Batu	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	0.00	0.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	15,000,000.00	13,098,800.00	87.33	1,901,200.00	0.00
Kecamatan Bathin Solapan	3,000,000.00	2,992,000.00	99.73	8,000.00	0.00
Jumlah	13,378,164,100.00	13,036,665,825.00	97.45	341,498,275.00	5,298,501,405.00

6. Belanja Aset Lainnya

Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Kurang/Lebih	Realisasi 2018
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tidak ada realisasi belanja modal Aset lainnya pada Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

C. Belanja Tidak Terduga

Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Kurang/Lebih	Realisasi 2018
722,191,759.66	0.00	0.00	722,191,759.66	253,200,000.00

Realisasi Belanja Tidak Terduga sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggarannya sebesar Rp722.191.759,66 mengalami penurunan sebesar Rp253.200.000,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp253.200.000,00.

5.1.3. Transfer

Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Kurang/Lebih	Realisasi 2018
472,164,046,985.81	457,694,035,532.81	96.94	14,470,011,453.00	409,101,069,819.00

Realisasi Transfer Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2019 adalah sebesar Rp457.694.035.532,81 atau 96,94% dari nilai anggaran sebesar Rp472.164.046.985,81. Jika dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp409.101.069.819,00 mengalami kenaikan sebesar Rp48.592.965.713,81 atau 11,88% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.69 Transfer

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Kurang/Lebih	Realisasi 2018
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	21,808,500,900.00	7,769,058,983.00	35.62	14,039,441,917.00	6,214,484,523.00
Transfer Bantuan Keuangan	450,355,546,085.81	449,924,976,549.81	99.90	430,569,536.00	402,886,585,296.00
Jumlah	472,164,046,985.81	457,694,035,532.81	96.94	14,470,011,453.00	409,101,069,819.00

A. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Kurang/Lebih	Realisasi 2018
21,808,500,900.00	7,769,058,983.00	35.62	14,039,441,917.00	6,214,484,523.00



Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp7.769.058.983,00 atau 35,62% dari anggaran sebesar Rp21.808.500.900,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.554.574.460,00 atau 25,02% dibandingkan realisasi TA 2018 yang berjumlah Rp6.214.484.523,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.70 Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Kurang/Lebih	Realisasi 2018
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	18,880,000,000.00	6,654,649,412.00	35.25	12,225,350,588.00	5,042,793,908.00
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	2,928,500,900.00	1,114,409,571.00	38.05	1,814,091,329.00	1,171,690,615.00
Jumlah	21,808,500,900.00	7,769,058,983.00	35.62	14,039,441,917.00	6,214,484,523.00

Transfer Bagi hasil pajak daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

B. Transfer Bantuan Keuangan

Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Kurang/Lebih	Realisasi 2018
450,355,546,085.81	449,924,976,549.81	99.90	430,569,536.00	402,886,585,296.00

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan selama sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp449.924.976.549,81 atau 99,90% dari anggaran sebesar Rp450.355.546.085,81 mengalami kenaikan sebesar Rp47.038.391.253,81 atau 11,68% dibandingkan realisasi TA 2018 yang berjumlah Rp402.886.585.296,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.71 Transfer Bantuan Keuangan

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Kurang/ Lebih	Realisasi 2018
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa - ADD Se-Kabupaten Bengkulu	283,368,291,054.81	283,368,291,049.81	100.00	5.00	259,556,930,896.00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa - UED/K-SP Se-Kabupaten Bengkulu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa - INBUP-PPIP Se-Kabupaten Bengkulu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa - Dana Desa dari APBN Se-Kabupaten Bengkulu	134,457,859,600.00	134,130,368,000.00	99.76	327,491,600.00	114,647,811,400.00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa - P3ID / Bantuan Khusus Se- Kabupaten Bengkalis	28,700,000,000.00	28,700,000,000.00	100.00	0.00	24,170,000,000.00
--	-------------------	-------------------	--------	------	-------------------



Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa - Bantuan Pikkades Se-Kabupaten Bengkulu	2,312,506,400.00	2,218,190,000.00	95.92	94,316,400.00	3,030,000,000.00
Belanja Bantuan Keuangan Lainnya - Partai Politik	1,516,889,031.00	1,508,127,500.00	99.42	8,761,531.00	1,481,843,000.00
Jumlah	450,355,546,085.81	449,924,976,549.81	99.90	430,569,536.00	402,886,585,296.00

5.1.4. Surplus (Defisit)

Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
(163,501,085,439.46)	16,589,510,186.91	(10.15)	180,090,595,626.37	200,655,430,039.72

Jumlah Surplus (Defisit) sebesar Rp16.589.510.186,91 tersebut merupakan surplus anggaran Pemerintah Kabupaten Bengkulu untuk tahun Anggaran 2019 dimana jumlah pendapatan daerah secara keseluruhan lebih besar dari jumlah belanja daerah dan transfer. Total realisasi pendapatan daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.774.437.763.944,69 sementara total realisasi belanja daerah dan transfer per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.757.848.253.757,78.

5.1.5. Pembiayaan

A. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
215,501,085,439.46	215,501,085,439.46	100.00	0.00	14,845,655,399.74

Penerimaan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu untuk tahun 2019 sebesar Rp215.501.085.439,46 berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu atau akhir tahun 2018.

Tabel 5.72 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Penggunaan SiLPA tahun lalu	215,501,085,439.46	215,501,085,439.46	100.00	0.00	14,845,655,399.74
Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	215,501,085,439.46	215,501,085,439.46	100.00	0.00	14,845,655,399.74

B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Kurang/Lebih	Realisasi 2018
52,000,000,000.00	10,000,000,000.00	19.23	42,000,000,000.00	0.00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp10.000.000.000,00.

Tabel 5.73 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Kurang/Lebih	Realisasi 2018
Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	52,000,000,000.00	10,000,000,000.00	19.23	42,000,000,000.00	0.00
Jumlah	52,000,000,000.00	10,000,000,000.00	19.23	42,000,000,000.00	0.00



5.1.6. SILPA

Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
0.00	222,090,595,626.37	0.00	222,090,595,626.37	215,501,085,439.46

Jumlah SILPA sebesar Rp222.090.595.626,37 tersebut merupakan selisih lebih anggaran untuk tahun Anggaran 2019 dimana jumlah pendapatan ditambah penerimaan pembiayaan secara keseluruhan lebih besar dari jumlah belanja ditambah dengan pengeluaran pembiayaan. Total realisasi penerimaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.989.938.849.384,15 sementara total realisasi pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp.3.767.848.253.757,78.

Tabel 5.74 SILPA

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
Pendapatan Daerah	3,901,482,457,873.00	3,774,437,763,944.69	96.74	127,044,693,928.31	3,359,727,964,530.99
Belanja dan Transfer Daerah	4,064,983,543,312.46	3,757,848,253,757.78	92.44	307,135,289,554.68	3,159,072,534,491.27
Surplus/ (Defisit): 1-2	(163,501,085,439.46)	16,589,510,186.91	(10.15)	(180,090,595,626.37)	200,655,430,039.72
Penerimaan Pembiayaan	215,501,085,439.46	215,501,085,439.46	100.00	0.00	14,845,655,399.74
Pengeluaran Pembiayaan	52,000,000,000.00	10,000,000,000.00	19.23	42,000,000,000.00	0.00
Pembiayaan Netto : 4-5	163,501,085,439.46	205,501,085,439.46	125.69	(42,000,000,000.00)	14,845,655,399.74
SILPA (SiKPA) 3+6	0.00	222,090,595,626.37	0.00	222,090,595,626.37	215,501,085,439.46

Jumlah SILPA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp222.090.595.626,37 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp6.589.510.186,91 atau 3,06% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp215.501.085.439,46 dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.75 Rincian SILPA

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	%
Kas di BUD	207,808,683,672.83	200,517,042,816.24	96.49
Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	326,280,757.00	0.00
Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	3,986,433.00	0.00	0.00
Kas di Bendahara Penerimaan	5,900,000.00	0.00	0.00
Kas di Bendahara JKN	1,271,465,892.00	0.00	0.00
Kas di Bendahara BLUD	8,140,177,538.54	14,462,355,436.22	177.67
Kas di Bendahara BOS	4,860,382,090.00	195,406,430.00	4.02
Jumlah	222,090,595,626.37	215,501,085,439.46	103.06